

# Perdagangan Internasional, Perekonomian Pedesaan dan Perempuan

*Perdagangan internasional yang mengarah pada perdagangan bebas ternyata berpengaruh negatif pada wanita. Hesti R. Wijaya melibat bahwa kebijakan di bidang perdagangan internasional tidak menyentuh masalah gender, akibatnya kaum wanita, khususnya wanita di pedesaan dirugikan baik di sektor domestik maupun dalam menjalankan peran produktifnya. Karena itu mengasah kepekaan masalah gender perlu mendapat prioritas tertinggi.*

## Hesti R. Wijaya

Kepala Pusat Penelitian Studi Wanita,  
Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya



Hesti R. Wijaya lahir di Bojonegoro, 4 November 1948. Memperoleh gelar Insinyur dari Fakultas Pertanian/Sosial Ekonomi Universitas Brawijaya dan gelar Doktor dari Melbourne University di bidang Ekonomi Pertanian. Selain aktif dalam bidang penelitian juga menjadi Staf Pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

**S**ecara normatif, meskipun banyak negara tidak membedakan laki-laki dan perempuan, dan lebih 120 negara meratifikasi konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi pada Wanita, keterabaian perempuan masih banyak terjadi. Isu persamaan status perempuan masih merupakan persoalan dunia dan akan menjadi topik pembicaraan pada Konferensi Dunia IV tentang Wanita dalam Pembangunan di Beijing bulan September 1995. Karena berstatus lebih rendah daripada lelaki, perempuan dianggap inferior, seringkali eksistensinya terlupakan dan tidak diperhitungkan. Mereka merupakan separoh penduduk yang tidak tampak atau tersembunyi. Banyak perempuan yang atas inisiatif sendiri telah bekerja dan berkontribusi pada pembangunan, pada bangsa dan negara, namun tak banyak terungkap tentang mereka. Data statistik tentang perempuan belum seluruhnya muncul. Dari sedikit yang muncul, kesenjangan antara lelaki dan perempuan jelas menunjukkan ketertinggalan perempuan daripada lawan jenisnya.<sup>1</sup>

Meskipun Dasawarsa Wanita sudah dicanangkan PBB tahun 1975-1985, dan gerakan wanita telah mendunia, namun hingga kini isunya masih tergolong baru. Kebijakan tak mudah dilaksanakan karena berbagai alasan seperti adat, budaya, kekhawatiran, ketidaktahuan, sinisme, serta pandangan rendah kebanyakan orang terhadap perempuan dan isunya. Dalam program pembangunan sektoral, isu perempuan belum banyak terjamah. Perempuan masih merupakan sumberdaya manusia yang tak tampak (*invisible*). Contohnya di sektor pertanian, terlepas dari keberadaan perempuan tani yang sudah sejak dulu berperan di sektor

1. Untuk Indonesia, baca misalnya BPS, *Indikator Sosial Wanita Indonesia* (Jakarta: Kerjasama BPS dengan UNICEF, 1993) Jakarta; Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, *Analisa Situasi Wanita* (Jakarta, 1994).

Meski perempuan  
berperan dan  
berkontribusi  
dalam  
peningkatan  
ekspor non-migas  
baik pada produk  
industri  
manufaktur  
maupun produk  
pertanian, isu  
perempuan di  
bidang ekonomi  
belum terangkat  
ke permukaan,  
terlebih isu  
ekonomi yang  
berhubungan  
dengan  
globalisasi.

ini dalam proyek maupun kegiatan rutin pertanian, mereka belum termasuk dalam daftar kelompok sasaran.<sup>2</sup>

Kalau peran perempuan pedesaan dalam sektor yang secara tradisional sudah melibatkan mereka saja isunya belum tampak, apalagi yang berkaitan dengan globalisasi. Hubungan antara isu global yang makro dengan perempuan di pedesaan yang mikro tentu jauh tak terlihat. Meski perempuan berperan dan berkontribusi dalam peningkatan ekspor non-migas baik pada produk industri manufaktur maupun produk pertanian, isu perempuan di bidang ekonomi belum terangkat ke permukaan, terlebih isu ekonomi yang berhubungan dengan globalisasi. Padahal baik langsung maupun tidak langsung, secara akut globalisasi akan melanda perempuan pedesaan pada 1990-an. Di tingkat internasional, sampai tahun 1985 saat berakhirnya Dasawarsa Wanita yang dicanangkan PBB isu ini belum muncul. Itulah sebabnya dokumen *Forward Looking Strategy for the Advancement of Women toward the year 2.000* (Strategi yang Diharapkan Memajukan Perempuan Menjelang Tahun 2.000) belum mencakupnya. Tanpa memperhatikan perempuan dalam kebijakan nasional dan internasional termasuk liberalisasi perdagangan, bisa jadi perempuan tak akan pernah mendapatkan manfaat.

### Peran Perempuan dalam Perekonomian Pedesaan

Sebagai negara agraris, jumlah perempuan usia di atas 10 tahun dalam sektor pertanian luas yang berada di wilayah pedesaan mencapai 40 persen.<sup>3</sup> Berbagai penelitian dalam sektor pertanian menunjukkan bahwa peran perempuan pada kegiatan pertanian sangat substansial.<sup>4</sup> Kesemuanya menyebut adanya pembagian kerja seksual di mana perempuan melakukan kerja selama proses produksi yang meliputi penanaman, penyiangan, pemeliharaan, panen, pasca panen, pemasaran, baik yang bersifat manajerial tenaga buruh, pada komoditi tanaman pangan ataupun tanaman industri yang diekspor. Beberapa pekerjaan malahan ada yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti halnya menanam bibit, menabur benih dan menyiang. Dalam proses budi-daya, nyaris tak ada benih jatuh ke bumi tanpa sentuhan tangan perempuan. Bahkan dalam pengairan, yang selama ini dianggap kerja lelaki, perempuan ternyata ikut menentukan kapan pengairan dilakukan, banyaknya kuantitas air, kedalaman air, frekuensi pengairan, termasuk "bagian kerja laki-laki" seperti adanya saluran irigasi yang memerlukan perhatian, misalnya, pe-

2. Hesti R. Wijaya, "Wanita, Sumberdaya Manusia yang Terabaikan: Perempuan Tani dalam Penyuluhan Pertanian," dalam *Masyarakat Indonesia*, vol. XX, No.2, 1993, hal. 233-256.

3. Dihitung dari Tabel 17.6 dan 17.7 BPS, lihat, BPS, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia* (Jakarta, 1993).

4. Baca misalnya Hesti R. Wijaya *et al.*, "Peningkatan Peranan Wanita Tani dalam Proyek Pertanian Lahan Kering," Laporan Baseline Study (Malang: Pusat Penelitian Studi Wanita UNIBRAW, 1993): juga Wijaya, *loc.cit.*

matang yang bocor.<sup>5</sup> Berarti, tanpa keterlibatan perempuan, proses produksi tak akan berlangsung, termasuk komoditi ekspor yang diperdagangkan secara internasional.

Industrialisasi ternyata membuka peluang bagi perempuan pedesaan. Sekarang, sumber pendapatan perempuan pedesaan tak saja dari sektor pertanian yang secara tradisional mendominasi kerja penduduk pedesaan. Di sektor formal, mereka juga bekerja dalam industri manufaktur yang diekspor, di sektor informal seperti industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.

Apakah gerangan latar belakang transformasi ini? Apakah kecenderungan meninggalkan pola kehidupan tradisional di pedesaan sekedar dalam rangka mencari kerja yang lebih baik? Ataukah ada akar permasalahan lain, yang menyebabkan perempuan mau bekerja semakin lama semakin jauh di luar desa asalnya? Mereka tidak saja bekerja di kota, bahkan juga ke luar negeri, ke negara lain yang belum pernah dikenalnya yang adat, budaya dan bahasanya berbeda jauh. Inipun tak terbatas pada mereka yang masih belum menikah. Yang berkeluarga juga bermigrasi ke luar negeri sebagai tenaga kontrakan pembantu rumah tangga, meninggalkan keluarganya di tanah air. Teori migrasi dan ideologi gender yang meramal bahwa perempuan hanya bekerja tak jauh dari tempat tinggalnya, ternyata tak lagi berlaku. Kontribusi mereka tidak hanya pada rumah-tangganya sendiri, tetapi juga dalam pembangunan fisik, pencari devisa, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial negara tempat mereka bekerja karena wanita majikannya menjadi bekerja, bahkan membebaskan kewajiban Pemerintah negara tersebut dari biaya sosial seperti pemeliharaan anak.<sup>6</sup>

Sebagai anggota masyarakat perempuan terlibat dalam kerja sosial yang tak dibayar, misalnya, dalam Posyandu. Besarnya kontribusi untuk itu belum pernah dihitung secara ekonomi, sama halnya dengan kontribusi dalam rumah tangga pada perhitungan GNP dan PDB. Bila tak luput dari perhitungan, GNP dan PDB tentu lebih tinggi.

*Teori migrasi dan ideologi gender yang meramal bahwa perempuan hanya bekerja tak jauh dari tempat tinggalnya, ternyata tak lagi berlaku.*

## Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional telah menjadi kegiatan ekonomi global yang menjadi perhatian (*interest*) semua negara di dunia.

5. M.A. Oomen-Myin, "The Position of Female Farmers in Irrigation Projects in Indonesia," A Discussion Paper, Embassy of the Netherlands, Jakarta, Mimeo, 1986; Wilma Wentholt, "Female Farmers from Invisible Workers to Active Participants," A Discussion Paper, Women and Development Section, Royal Netherlands Embassy, Jakarta, Mimeo, 1991; M. Casey, *Sociological Madura Groundwater Irrigation Project: Study of Women in Agriculture in Madura* (Pamekasan: Groundwater Development Consultants (international) Ltd., 1989); Hesti R. Wijaya, "Wanita Tani dalam Pembangunan Pertanian: Pengembangan Irigasi Air Tanah," makalah inti dalam Lokakarya "Wanita dan Irigasi Pertanian di Madura," diselenggarakan di Pamekasan 28-29 Juli 1992 oleh Badan Pelaksana Proyek Pengembangan Air Tanah (BP P2AT) Jawa Timur, Dirjen Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum.

6. Noeleen Heyzer and Vivienne Wee, "Domestic Workers in Transient Overseas Employment: Who Profits? Who Benefits?" dalam N. Heyzer, *et al.*, *The Trade in Domestic Workers: Causes, Mechanisms and Consequences of International Migration* (Kuala Lumpur: APDC, London: Zed Books Ltd, 1994).

Trend yang berkembang adalah menuju perdagangan bebas, sebagai realisasi dari kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) yang telah ditandatangani oleh negara anggotanya di Marakesh tahun lalu. Berbicara mengenai perdagangan internasional tak membuat banyak orang bertanya tentang relevansinya dengan perempuan di pedesaan. Adanya budaya patriarki dan ideologi *gender* ter subordinasi membuat perempuan tak tampak. Apakah permasalahan perdagangan internasional yang menyangkut perempuan pedesaan?

### *Persetujuan GATT*

Sebagai tindak lanjut dari penerimaan dokumen akhir Putaran Uruguay, GATT Treaty di Marrakesh 15 April 1994, perdagangan dunia pasca GATT berada di bawah pengelolaan Organisasi Dagang Dunia (*World Trade Organization-WTO*). Dalam WTO, GATT menjadi peraturan perundangan internal. Negara anggota harus mempunyai peraturan perundangan nasional sesuai dengan WTO.

Secara garis besar, GATT terdiri dari 3 bagian, yaitu (1) *treaty* tentang pertanian; (2) *treaty* tentang hak milik intelektual, dan (3) jasa-jasa perdagangan. Aspek-aspeknya mencakup *Tariffs*; peraturan *Non-tariff*, produk-produk berdasar sumberdaya alam, tekstil dan garmen, produk tropis, TRIPS (*Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights and Trade in Counterfeit Goods*), TRIMs (*Trade-related Investment Measures*), jasa perdagangan, peraturan balasan terhadap pemberian subsidi, dan lain-lain. Perdagangan yang disepakati adalah perdagangan bebas yang transparan, tanpa proteksi. Bagi komoditi pertanian termasuk pangan, setiap negara termasuk yang sedang berkembang harus membuka pasar impor pangan dari negara maju. Subsidi langsung pada petani dilarang, namun subsidi pada eksportir diizinkan. Pada usahatani kecil di mana manajemen usaha dan rumah tangga tak bisa dipisahkan, tentu hal ini berdampak pada petani perempuan yang berperan ganda dalam sektor pertanian dan peran *gender* ekonomi rumah tangga.

Prinsip WTO tidak memasukkan aspek lingkungan, kesehatan, hak pekerja ataupun tujuan kebijaksanaan kemanusiaan, termasuk tentang kepeduliannya pada masalah perempuan. WTO dapat diramalkan akan merupakan suatu lembaga internasional baru yang kuat, namun mandatnya terbelakang. Ketika dunia sudah begitu mempedulikan masalah lingkungan dan perempuan, WTO belum memperhitungkannya. Perempuan dan kepedulian masalah *gender* absen dari proses formulasi kebijaksanaan GATT dan institusi WTO.

Untuk kesuksesan pelaksanaan dan promosi peraturan GATT, WTO harus bekerja sama dengan Bank Dunia dan IMF. Karena itu kebijaksanaan perdagangan internasional berjaln dengan urusan lembaga ini terhadap negara pengutang luar negeri.

Dalam praktek, kebijaksanaan yang sudah muncul untuk bidang pertanian berupa: 1. Penghapusan subsidi Pemerintah: a. subsidi sarana produksi; b. Subsidi produk pertanian; c. kredit;

*Prinsip WTO tidak memasukkan aspek lingkungan, kesehatan, hak pekerja ataupun tujuan kebijaksanaan kemanusiaan, termasuk tentang kepeduliannya pada masalah perempuan.*

2. Penghapusan kuota impor; 3. Penghapusan kuota ekspor; 4. Imposisi hak milik intelektual: a. terhadap benih; b. terhadap pupuk dan pestisida; c. terhadap teknologi.

Memasuki perdagangan bebas dengan persaingan global yang menjanjikan berbagai keuntungan tidaklah mudah bagi negara sedang berkembang termasuk Indonesia yang merupakan relatif produsen baru dan pendatang baru dalam perdagangan dunia. Perdagangan bebas yang menghapus *barrier* dan proteksi dapat memberikan berbagai dampak. Dengan tidak adanya pajak yang dikenakan bagi barang impor, tidak ada kuota dan tidak ada *tariff*, akan lebih banyak barang impor yang terbang menuju negara-negara berkembang. Produksi dalam negeri yang tidak dilindungi pasti tidak mampu bersaing dengan barang impor yang berkualitas lebih bagus dan barangkali harganya lebih murah. Produksi dalam negeri yang tak mampu bersaing akan mati pelahan-lahan. Negara yang sedang berkembang secara tak disadari akan menjadi konsumen produk negara maju, dan tak jarang wanita dijadikan obyeknya. Pada akhirnya kesenjangan selalu terjadi. Negara berkembang tak akan pernah bisa mengejar ketertinggalannya terhadap negara maju. Ramalan Bank Dunia terhadap distribusi keuntungan perdagangan bebas sebagai berikut dikhawatirkan betul-betul menjadi kenyataan:

Kalau negara maju akan memperoleh keuntungan sekitar dua-pertiga, negara yang sedang berkembang dengan penduduk yang mencapai empat per lima populasi dunia hanya mendapatkan sepertiga keuntungan ekonomi dunia. Ketimpangan antara negara maju dan negara Dunia Ketiga tetap terjadi.

Belajar dari komoditi ekspor perdagangan bebas, sudut pandang perempuan petani di pedesaan mengundang alternatif pemikiran baru. Secara tradisional kopi adalah komoditi ekspor. Menghadapi perdagangan bebas, kuota tak lagi diterapkan sehingga persaingan bebas pada awal tahun 1990-an akan mendorong turunnya harga kopi di pasar dunia. Kopi Indonesia yang sebagian besar adalah kopi rakyat tak bisa bersaing karena mutunya rendah. Bersamaan dengan pengurangan subsidi terhadap input, suatu penelitian pada kopi rakyat di Jawa Timur<sup>7</sup> menyimpulkan bahwa persaingan bebas mengakibatkan petani kopi mengalami penciutan biaya-harga. Di satu sisi biaya produksi meningkat, dan di sisi lain harga mengalami kemerosotan. Ekonomi rumah tangga petani menderita baik pe-

TABEL 1. Distribusi Keuntungan Perdagangan Dunia menurut Estimasi Bank Dunia

Negara	Keuntungan (milyar US \$)	Prosentase (%)
1. Negara industri dan Masyarakat Ekonomi Eropa	80,7	37,9
2. Jepang	25,9	12,2
3. Amerika Serikat	10,8	5,1
4. Kawasan Perdagangan Bebas Eropa (European Free Trade Area - EFTA)	12,8	6,0
5. Kanada, Australia, Selandia Baru	11,6	5,4
6. Negara Dunia Ketiga	71,2	33,4
Jumlah	213,0	100

SUMBER: Bank Dunia

7. Hesti R. Wijaya, "Exercise on Free Trade: Learning from the Case of Coffee, Nurturing the Seeds of Unity, and SAPs on Asian Peasant Women, dalam Nuture the Seed of Unity, Take Root and Reclaim Our Lives," dalam L.P. Mariano, *et al.*, *Asian Peasant Women Dialogue on the GATT and SAPs* (Quezon City: AMIHAN, 1992).

*Penggunaan tenaga kerja perempuan, lebih-lebih dari wilayah pedesaan dikehendaki, tak saja oleh karena stereotip wanita yang telaten dan rajin, tetapi juga karena mendukung biaya minimum dan maksimisasi keuntungan karena upahnya lebih rendah daripada pekerja laki-laki.*

nyediaan modal musim berikut maupun bagi biaya hidup keluarganya. Kantong kemiskinan baru terbentuk, atau kemiskinan lama diperakut.

Perdagangan internasional komoditi pangan pun harus berlangsung bebas. Berarti negara berkembang mesti siap membebaskan impor pangan dari negara maju, yang oleh kemajuan teknologi (dengan paten hak pemilikan intelektualnya) dan kemampuan membiayai proses produksi padat modal, menjadikan produk biji-bijian dan produk berasal dari susu dan daging lebih murah dari produk negara berkembang. Liberalisasi perdagangan membuat negara berkembang terdorong untuk mengimpor pangan yang lebih murah tersebut. Ada kemungkinan IMF akan merekomendasi bantuan pangan murah sehingga tertutup pintu bagi negara lain untuk menjual pangan ke negara tersebut. Di negara kita, Paket deregulasi 23 Mei 1995, misalnya, secara substansial sudah mengarah pada program perdagangan bebas yang terencana. Bagi komoditi pertanian seperti beras dan gula, dapat diramalkan akan terjadi dampak pada petani karena harga di pasar internasional lebih murah daripada harga di dalam negeri.

Dalam situasi kurang modal, penanaman modal asing dalam bentuk MNC (*Multi-National Companies*) dan TNC (*Trans-National Companies*) diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan menambah perolehan devisa. Seperti halnya perusahaan pencari untung pada umumnya, maksimisasi keuntungan sebagai tujuan dan prinsip efisiensi diterapkan berdasarkan biaya minimum. Penggunaan tenaga kerja perempuan, lebih-lebih dari wilayah pedesaan dikehendaki, tak saja oleh karena stereotip wanita yang telaten dan rajin, tetapi juga karena mendukung biaya minimum dan maksimisasi keuntungan karena upahnya lebih rendah daripada pekerja laki-laki. Upah buruh perempuan yang rendah sesuai dengan konsep efisiensi yang menguntungkan perusahaan. Pemanfaatan tenaga kerja perempuan seperti ini terjadi baik dalam industri manufaktur maupun industri pertanian. Meskipun besar kontribusinya, namun belum memperoleh imbalan dan penghargaan yang semestinya.

Dalam sektor pertanian, MNC dan TNC membuka agribisnis yang mencakup industri hulu seperti memproduksi pupuk, obat-obatan dan benih, serta menghasilkan komoditi pertanian pangan, komoditi ekspor dan pengolahannya. Bersama dengan intensifikasi pertanian, petani kecil pun harus membeli sarana produksi hasil pabrik. Ketika subsidi dihapus, pembelanjaan sarana produksi itu merupakan ekonomi biaya tinggi. Terlebih bersamaan dengan itu terjadi kenaikan pajak. Ketahanan keberlanjutan usaha tani tinggal bergantung pada kemampuan bertahan hidup keluarga petani, di mana perempuan tani ikut menentukan.

Dengan meningkatnya MNC dan TNC, kebutuhan tanah meninggi. Tidak saja untuk mendirikan pabrik dan lahan garapan, namun juga untuk keperluan rekreasi investor, pengusaha dan relasinya seperti halnya dengan lapangan golf, villa, tempat peristirahatan. Hutan serta lahan milik petani adalah sasaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Keduanya menimbulkan masalah.



# Air sebagai Nadi Kehidupan

## Peran Perum Otorita Jatiluhur dan Perum Jasa Tirta

Beberapa ahli berpendapat bahwa pada beberapa tahun mendatang air sebagai sumber daya alam akan menjadi salah satu pusat permasalahan kehidupan di muka bumi. Dalam perspektif sosial-ekonomi, permasalahan tentang air muncul karena meningkatnya kebutuhan manusia, seiring dengan penggunaan teknologi dalam rangka pendayagunaan air. Bagaimana inti permasalahan sumberdaya air, bagaimana peran perundangan yang ada, apa saja *policy* para pengambil keputusan, termasuk di dalamnya manajemen yang dijadikan *option*, teknologi yang dipilih, serta masalah kelembagaan dan peranserta masyarakat? Sebagai kado bagi 50 tahun Indonesia merdeka, Prisma menurunkan suatu pembahasan tentang masalah tersebut, dengan menyoroti peran **Perum Otorita Jatiluhur** dan **Perum Jasa Tirta**.



## Sumber Daya Air: Pendekatan dan Tujuan

Dalam memperingati Hari Pangan Sedunia 1994 lalu, *Food and Agriculture Organization* (FAO) memunculkan tema "Air untuk Kehidupan" atau *Water For Live*. Tema yang diambil oleh Organisasi Pangan yang bernaung di bawah bendera PBB ini sekilas tampak sederhana. Tapi di dalam tema itu, setidaknya ada dua aspek krusial yang ingin ditekankan dalam mempersiapkan langkah-langkah penting guna pengamanan air di masa-masa mendatang.

Aspek pertama yang berkaitan dengan masalah "pendekatan" yaitu bagaimana menemukan pola yang baik bagi manajemen air secara global. Latar belakang pertimbangannya, ternyata bukan cuma di daerah yang secara geografis langka air saja terdapat kantung-kantung kemiskinan, namun juga di daerah yang suplai airnya berlimpah. Ini menunjukkan bahwa titik permasalahan dalam kasus seperti itu adalah ketepatan metode pengelolaan sumberdaya air.

Aspek kedua menyangkut "tujuan", yaitu soal kelestarian air. Ini muncul dari pengamatan dan prediksi bahwa suplai air dunia baik secara kuantitas maupun kualitas tidak akan bisa mendukung masa depan kehidupan manusia jika tanpa manajemen yang baik. Jumlah orang yang kekurangan air saat ini mencapai 300 juta, yang bila diproyeksikan ke tahun 2025 nanti, jumlah tersebut akan menjadi sepuluh kali lipat. "Oleh karena itu, setiap upaya pengelolaan air harus menuju kepada gagasan tunggal, yaitu kelestarian air," kata Menteri Pekerjaan Umum, Radinal Mochtar.

Setelah KTT Bumi 1992, kembali FAO menabuh gendang untuk mengingatkan dunia: masalah air akan menjadi kendala bagi kehidupan. Sebelum terlambat, demikian para pakar lingkungan dunia mengimbau, manusia perlu melakukan koreksi terhadap logistik air bumi secara tepat guna, tepat jumlah dan tepat waktu bagi kehidupan. Dalam rumusan FAO, mustahil manusia dapat memanen keragaman alami tanpa air yang tepat, sehat dan cukup. Sehingga tak berlebihan jika di Indonesia Presiden Soeharto dalam beberapa kesempatan mengkampanyekan hemat air.

Tiap tahun diperkirakan 500.000 km<sup>3</sup> air tanah dan laut dikonversi oleh tenaga surya dan dikucurkan kembali ke bumi sebagai hujan dan salju. Air inilah yang kemudian dimanfaatkan un-

tuk berbagai kepentingan manusia, seperti: irigasi, PLTA, pengisi danau dan sungai, serta pencuci polusi. Menurut perkiraan studi Shiklamanov dalam "*Global Water Resources*", *Nature and Resources*, Vol. 20, 1993, permintaan air di dunia akan meningkat 5 kali dari tahun 1940 ke tahun 2000. Sektor pertanian adalah pengguna terbesar yaitu sebanyak 66 persen. Air bagi pertanian merupakan syarat keharusan. Demikian pula air bersih untuk minum. Walhasil, tidak akan pernah ada kehidupan tanpa adanya air.

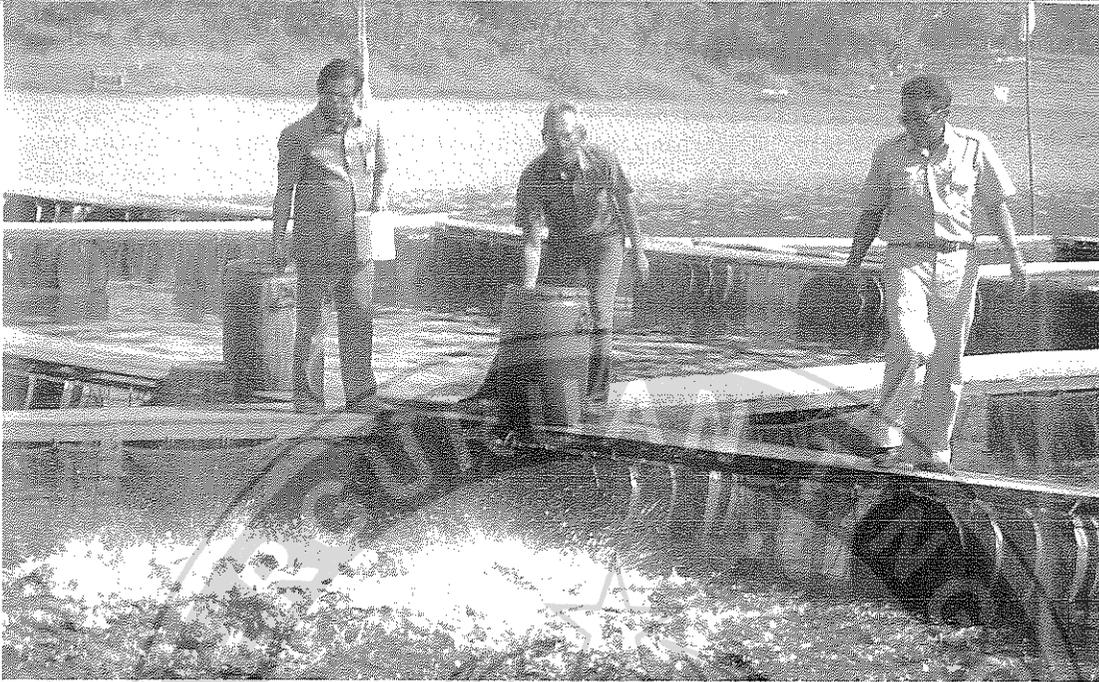
## Air: Restorasi dan Transformasi

Bumi yang kita diami, jika dipotret dari luar angkasa seperti hamparan karpet biru bermotif bunga-bunga, di mana air dan kehidupan menyatu. Air berfungsi sebagai penyelamat karena memberi kesempatan hidup bagi makhluk. Kisah spektakuler adalah transformasi 5000 km<sup>2</sup> gurun di Distrik Keita, Nigeria. Berkat bantuan FAO dukungan biaya pemerintah Italia dalam kerangka *World Food Program*, dengan menghabiskan 4 juta jam kerja pria dan wanita melalui *food for work program*, gurun seluas itu berhasil dihijaukan sehingga ternak dapat berkeliaran di atasnya. Di lahan itu pula kini terdapat sekolah, rumah sakit, industri kerajinan, dan balai pertemuan petani.

Indonesia sendiri pernah mencoba melakukan restorasi seperti itu, antara lain di kawasan Gunung Kidul. Sayangnya, *food for work program* di Indonesia lebih bermotifkan bantuan sosial akibat kurang pangan, dan bukan program berencana memproduktifkan tanah tandus.

Di sisi lain, air termasuk penyebab bencana alam pembunuh kedua terbesar atau sekitar 40 persen setelah gempa, terlebih saat musim kering keras dan berkepanjangan. Setidaknya ada tiga faktor pemicu kelangkaan air: *Pertama*, variasi iklim yang mengakibatkan variasi curah hujan. Kekeringan yang melanda Afrika awal 70-an dan pertengahan 80-an mengancam kehidupan 40 persen penduduk benua hitam itu. Di Indonesia yang menurut berbagai pengamat menganut siklus 4 atau 5 tahunan mengakibatkan penurunan produksi pangan, kematian ternak dan berjangkitnya penyakit. Air menjadi barang langka, dan kemudian menjadi komoditi bisnis.

*Kedua*, efek degradasi. Penggundulan hutan dan konsentrasi penggembalaan adalah pemicu



Pemanfaatan air untuk budidaya ikan di Jatiluhur

erosi. Di Indonesia tidak jarang terjadi longsor di awal musim hujan karena akar tanaman tidak kuat lagi mengikat air. Pendangkalan sungai dan pelepasan air mengakibatkan banjir sebagai pembunuh massal.

*Ketiga*, dampak pertumbuhan penduduk. Setiap 2 manusia lahir mengurangi 50 persen air bagi 2 orang lainnya. Akibatnya, penduduk berjuang memperoleh air tanpa menghiraukan kebersihan. Menurut WHO setiap tahun sekitar 4 juta anak meninggal karena diare, yang hal itu disebabkan keracunan air yang terinfeksi oleh jentik nyamuk, siput dan telur cacing. Dalam era industrialisasi keracunan diperparah lagi oleh pencemaran limbah pabrik. Menurut perkiraan terakhir "UN International Drinking Water Supply and Sanitation Decade (1989-1984), 31-46 persen penduduk negara berkembang hidup di lokasi rawan air sehat.

## Manajemen Air: Kuantitas dan Kualitas

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan volume pembangunan yang terus meningkat, air bukan lagi barang yang tersedia secara melimpah dan bebas digunakan. Pembangunan ekonomi Indonesia yang begitu cepat

menuntut adanya pengelolaan sumberdaya air secara profesional agar dapat mendukung kebutuhan air yang semakin kompleks.

Pembangunan sumberdaya air pada PJP I bertujuan memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan nasional, sehingga dapat tercipta kerangka landasan yang kokoh guna memasuki era tinggal landas dan era globalisasi. Keberhasilan swasembada pangan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian jelas tidak mungkin dipisahkan dengan prasarana pengairan yang memadai dan pengelolaan sumberdaya air yang baik.

Dalam PJP II, manajemen pengelolaan sumberdaya air diarahkan pada dua sasaran, yaitu kuantitas dan kualitas. Untuk itulah dibangun prasarana pengairan, antara lain berupa bendungan, waduk, bendung, saluran pengelak banjir, check dam, pintu pengambilan, saluran induk irigasi dan bangunan prasarana pengairan lain yang berfungsi dan mempunyai sasaran untuk perlindungan, pengendalian, dan pemanfaatan potensi sumberdaya air. Sebagai *pilot project* untuk menangani prasarana pengairan itu, pemerintah membentuk dua Perusahaan Umum (Perum), yaitu Perum Otorita Jatiluhur untuk wilayah Jawa Barat dan Perum Jasa Tirta untuk wilayah Jawa Timur. ■

# Waduk: Kemakmuran Melalui Air

Dalam abad ke-12, seorang bijak bernama King Parakrama Bahu dari Sri Lanka bertutur, "Let not a single drop of water that falls on the land go into the sea without serving the people". Menyambut fajar milenium ketiga sesaat lagi, kalimat indah bernada peringatan tersebut terasa sarat makna dan relevan untuk dikutip, mengingat banyaknya pemborosan dan kesembronoan dalam menggunakan air.

Menurut penelitian di berbagai negara Asia diperkirakan 20 persen air irigasi sejak keluar dari dam hingga ke jaringan saluran hilang dalam jaringan sekunder dan tertier, dan 20 persen digunakan tidak optimal di areal persawahan. Berarti tingkat efisiensi pemanfaatan air hanya sekitar 40 persen.

Bagi Indonesia yang mempersiapkan lepas landas lewat industrialisasi, menjamurnya pabrik berpotensi lebih memperburuk inefisiensi karena unsur pencemaran air bukan saja merugikan manusia, tetapi juga kematian aneka jenis makhluk hayati, seperti ikan dan ternak.

Menyadari arti penting air sebagai soko guru kehidupan, pemerintah Indonesia yang dibantu

oleh Bank Dunia dalam hal pembiayaan, mengambil keputusan untuk membangun sejumlah prasarana dan sarana pengairan, seperti Waduk Jatiluhur yang berlokasi di Purwakarta dan Bendungan Sutami yang berkedudukan di Malang. Pembangunan waduk dimaksudkan untuk mengatasi masalah suplai air demi terwujudnya kemakmuran masyarakat.

Seorang pengamat ekonomi pertanian, *Chrisman Silitonga* di harian *Kompas* menulis, sumber daya air yang tanpa mendapat penanganan yang baik dan dibiarkan tercemar oleh aneka limbah pada gilirannya justru menjadi pembunuh sumber ekonomi sebagian masyarakat petani. Untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan terpadu yang multiaspek.

Secara administratif perlu diberdayakan perangkat pengaturan yang baik dan adil bagi seluruh komponen yang terlibat. Secara kultural, perlu ditumbuhkan kesadaran akan cara kerja siklus air, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan ekologisnya. Secara sosial-ekonomis, hakekat pengelolaannya harus mencerminkan dimensi keadilan dan efisiensi bagi semua pengguna air.

## Melayani dengan Kemandirian

Wawancara dengan Direktur Jenderal Pengairan Departemen PU., Ir. Soeparmono.

*Tanya (T): Apa peran strategis Perum Otorita Jatiluhur (POJ) dan Perum Jasa Tirta (PJT)? Apa konsep awal berdirinya kedua Perum tersebut?*

Jawab (J): Saat ini pemerintah ingin agar investasi di bidang pembangunan, 70 persen porsinya dibiayai masyarakat dan 30 persen dibiayai pemerintah. Setelah 25 tahun kita membangun, kemajuan prasarana ekonomi meningkat pesat, seiring dengan itu permintaan masyarakat juga terus meningkat.

Berpijak pada pemikiran itulah maka POJ dan PJT sebagai BUMN andalan PU di sektor pengairan diharapkan mampu menjadi pionir dan katalisator bagi usaha-usaha investasi masyarakat di bidang prasarana dan sarana pengairan. POJ dan PJT harus mampu membangun *image*

yang baik bagi masyarakat.

Tentang apa konsep awal didirikan POJ dan PJT, dalam landasan pemikirannya ada konsep bagaimana hasil-hasil pembangunan itu tidak membebani pemerintah, khususnya di bidang pembiayaan operasi dan pemeliharaan. Lalu dibentuklah Perum yang sifatnya tidak semata mencari keuntungan dan bertujuan melayani kebutuhan masyarakat.

*(T): Sebagai BUMN yang mengemban fungsi sosial, bagaimana kiat dan policy pemerintah guna mewujudkan adanya investasi?*

(J): Karena air merupakan hajat hidup orang banyak, maka bentuk yang paling cocok untuk BUMN tersebut adalah Perum. Tugas utamanya

## Pengelolaan Air: Back to Basic

Kembali ke akar persoalan, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan di mana air merupakan kekayaan alam yang dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, air dan sumber-sumber air, termasuk di dalamnya prasarana dan sarana pengairannya, sudah seharusnya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan umum, seperti: irigasi, drainase, listrik tenaga air, air minum, industri, perikanan, navigasi, rekreasi, pengendali keasinan, penggelontoran kota dan berbagai keperluan lain.

Konsekuensi logis dari pemanfaatan yang multi sektoral tersebut, beberapa Instansi dan Badan akan terkait di dalam Pengembangan Wilayah Sungai. UU. No 11/Tahun 1974 tentang Pengairan Pasal 4 menyebutkan bahwa wewenang pemerintah dalam hal pengelolaan air dan sumber-sumber air dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan atau badan-badan hukum tertentu yang syarat-syarat dan cara-caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengembangan Wilayah Sungai yang banyak dianut selama ini mengikuti falsafah: satu sungai, satu rencana, satu manajemen atau yang lebih dikenal dengan *one river, one plan, one management*. "Mengingat begitu banyak instansi atau badan yang terkait di dalam pengembangan Wilayah

Sungai, maka perlu adanya suatu sistem *manajemen interdependensi* di dalam pengelolaannya." demikian Menteri Pekerjaan Umum, Radinal Moochtar.

*International Seminar on Integrated Development and Management of Water Resources for Sustainable Use in Indonesia* di Bogor tahun 1992 lalu, dalam salah satu butir kesimpulannya menyatakan bahwa wilayah sungai perlu dijadikan sebagai satuan pengembangan dan manajemen sumberdaya air terpadu.

Sebenarnya, wilayah sungai sebagai satuan pengembangan telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri No. 39/PRT/1989 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 22/1982 tentang Tata Pengaturan Air. Menurut Permen ini, wilayah sungai di Indonesia terbagi ke dalam 90 Satuan Wilayah Sungai (SWS).

Pendekatan SWS ini dijadikan sebagai satuan wilayah perencanaan dan pengembangan sumberdaya air untuk mengatur kapasitas sumberdaya air. Saat ini, institusi pengelola sumberdaya air secara terpadu yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab mutlak belum ada. Misalnya untuk menentukan alokasi penggunaan air dalam satu satuan wilayah sungai, masih banyak instansi lain yang terkait dan tak jarang tugas dan kewenangannya masih tumpang tindih. ■

adalah melayani kepentingan masyarakat, tapi juga jangan membebani pemerintah. Boleh mendapatkan keuntungan, asal tidak membebani masyarakat. Selain itu, dengan status Perum mereka tidak boleh rugi. Jangan *kok* dengan alasan melayani kepentingan masyarakat maka terus menerus minta disubsidi.

Lalu dalam kaitannya dengan keberadaan mereka di wilayah, ingin saya tegaskan bahwa Departemen PU adalah departemen teknis. Dalam susunan hirarki pemerintahan, Menteri PU bertugas membantu Presiden. Menteri PU tidak punya wilayah. Kewenangan yang diberikan Presiden adalah kewenangan dalam hal kebijaksanaan. Sedangkan kewenangan mengenai kegiatan operasional di wilayah sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur.

POJ maupun PJT sudah seyogyanya selalu harus menyerasikan diri dalam hal kegiatan operasionalnya terhadap kebijaksanaan wilayah di mana dua BUMN itu beroperasi.

(T): Apa tidak menimbulkan tumpang tindih dalam hal kebijaksanaan di lapangan? Bentuk koordinasinya?

(J): Masalah ini sering ditanyakan. Jawaban saya begini, kalau PU adalah Departemen teknis, yang Menterinya adalah pembantu Presiden, tugasnya menyiapkan dan membuat perundang-an yang berlaku di seluruh Indonesia. Menyangkut wilayah, Menteri minta Gubernur sebagai aparat pusat, bukan Kepala Daerah Tingkat I otonom.

Kalau kemudian ternyata ada ketidakserasian antara kebijaksanaan pusat dan kebijaksanaan daerah, kita bisa tanya ke Gubernur kenapa hal itu sampai terjadi. Masalahnya, setiap daerah punya karakteristik tersendiri, sehingga ada yang sama dengan kebijaksanaan pusat dan ada yang kurang bisa mengaplikasikannya.

Masalahnya menyangkut soal bagaimana mengintegrasikan antara kebijaksanaan pusat dan pelaksanaan di lapangan. Sasarannya adalah sinkronisasi program. ■

# Perum Otorita Jatiluhur: Mengembangkan Potensi Multiguna

Masih banyak orang mengira bahwa pembangunan waduk Ir. H. Djuanda atau waduk Jatiluhur yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat, hanya untuk mendukung sektor pertanian saja. Anggapan tersebut memang tidak salah, tapi jelas kurang menjawab seluruh daya, potensi dan kapasitas yang dimilikinya.

Waduk Jatiluhur mempunyai daya, potensi dan kapasitas yang cukup besar untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Bukan hanya mendukung sektor-sektor strategis seperti irigasi, air minum, penanggulangan banjir, serta kepentingan infrastruktur pengairan saja, tapi juga potensial untuk sektor pariwisata.

Pengembangan waduk Jatiluhur menjadi aset pariwisata juga bukan cuma impian. Melihat kondisi alam yang permai, kawasan hutan lindung yang mengitarinya, serta curahan air sungai Citarum yang ditampung dalam waduk raksasa, kesemuanya itu menyimpan potensi multiguna yang bisa dikembangkan untuk segala sektor, tak terkecuali sektor pariwisata.

## Munculnya Waduk Juanda

Pada awal kemerdekaan Indonesia, atau tepatnya tahun 1948, dibangun Bendung Barugbug untuk pengairan Cilamaya seluas 5.000 ha. Lokasi pembangunan Bendung Barugbug berada di suatu titik di mana sungai Cilamaya dan sungai Ciherang sangat berdekatan, sehingga pembangunan bendung tersebut sekaligus mempertemukan dua aliran sungai. Meski demikian, aliran air ke hulu bendung dipisahkan lagi, masing-masing dikendalikan dengan pintu radial kembar ke sungai Cilamaya dan sungai Ciherang.

Dalam usaha meningkatkan keadaan ekono-



POJ: Melestarikan dan memanfaatkan air

mi nasional, terutama dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan (beras), pada zaman Kabinet Ir. H. Juanda tahun 1955, pemerintah melaksanakan program intensifikasi tanam dan ekstensifikasi lahan pertanian sawah.

Untuk melaksanakan program tersebut, gagasan yang pernah dicetuskan oleh W.J. van Blommestein, seorang Insinyur Kepala pada Divisi Irigasi dan Sanitasi Departemen PU di Batavia yang ditulis dalam majalah *Ingenieur in Indonesia* tahun 1948 dengan judul "*Een Federaal Welvaartsplan vor Het Westelijk Gedeelte van Java*" kembali dikaji.

Dalam artikel yang juga pernah dipresentasikan dalam Kongres Internasional di Paris tahun 1949 itu, Blommestein mengemukakan rencana pengembangan sumberdaya air secara terpadu di Pantai Utara Jawa bagian barat, dari daerah Banten sampai Pekalongan, antara lain untuk pengembangan lahan dengan irigasi seluas 520.000 ha. Garis besar gagasan ini ialah ingin memanfaatkan sumberdaya air yang ada di Jawa Barat secara terpadu. Sungai Citarum dapat dimanfaatkan secara optimal apabila dibangun tiga buah waduk yang besar-besar, yaitu: Jatiluhur, Cirata, dan Saguling.



Namun dengan berbagai alasan dan pertimbangan, oleh van Schravendijk pada tahun 1955, rencana tersebut diperkecil menjadi 240 ha, dalam notanya yang bertajuk "*Eksplorasi Waduk Jatiluhur*". Rencana Schravendijk inilah yang selanjutnya menjadi dasar dilaksanakannya Proyek Serbaguna Jatiluhur.

Pelaksanaan Proyek Serbaguna Jatiluhur dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu: *Pertama*, pembangunan bendungan dan waduk dengan PLTA pada sungai Citarum. Pelaksanaan proyek ini dipimpin oleh Ir. Sedyatmo. *Kedua*, pembangunan dan pengembangan Jaringan irigasi Jatiluhur seluas 240.000 ha, terletak antara Sunter di Jakarta sampai Cilalanang di Kabupaten Indramayu, yang pelaksanaannya dipimpin oleh Ir. Agus Prawiranata.

Dengan selesainya bangunan utama, yaitu Bendung Curug, Cibeet, Cikarang, Bekasi dan Cimacan, serta sebagian besar jaringan utamanya seperti Saluran Induk Tarum Barat dan Saluran Induk Tarum Timur berikut saluran-saluran sekundernya, maka pembangunan Proyek Irigasi Jatiluhur pada tahun 1968 dinyatakan selesai.

Untuk mengenang jasa salah seorang putra terbaik bangsa, pada tanggal 26 Agustus 1967 oleh Pejabat Presiden Republik Indonesia, Jenderal Soeharto, Bendungan serta Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatiluhur diresmikan dengan nama Ir. H. Juanda.

### Dari PN Jatiluhur ke Perum Otorita Jatiluhur

Sekitar satu bulan sebelum Bendungan dan PLTA Jatiluhur diresmikan, tanggal 24 Juli 1967 ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1967 tentang pembentukan Perusahaan Negara (PN) Jatiluhur. Dengan terbentuknya PN Jatiluhur, maka Waduk Jatiluhur berikut PLTA Jatiluhur dan Gardu Induknya diserahkan kepada PN Jatiluhur. Pelaksanaan penyerahan dan peralihan diatur oleh Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga.

Agar tidak membebani negara, untuk pemeliharaan waduk, PLTA dan segala peralatannya, PN Jatiluhur boleh melakukan usaha komersial. Usaha komersial itu, antara lain meliputi: Penyediaan air untuk Jawa Barat dan DKI Jakarta, penyediaan tenaga listrik melalui gardu induk Jatiluhur,

budidaya perikanan darat, serta usaha-usaha komersial lain. Selain itu, juga merintis pembangunan proyek-proyek selanjutnya dengan menyusun *overall planning*, antara lain untuk Waduk Saguling dan Waduk Cirata.

Mengingat tujuan utama Proyek Serbaguna Jatiluhur adalah untuk meningkatkan produksi pangan nasional, beberapa usaha PN Jatiluhur yang pada hakekatnya mempunyai fungsi sosial, dirasakan janggal untuk dikomersialkan. Misalnya suplai air untuk irigasi, waduk untuk pengendalian banjir, serta air untuk penggelontoran kota. Di sisi lain, sebagai sebuah perusahaan sudah sewajarnya prioritas pengelolaan sumberdaya air diarahkan pada usaha komersial.

"Keadaan tersebut sangat dilematis, dan mengakibatkan koordinasi pengelolaan kurang harmonis," kata Ir. Muhamad Ulama, Direktur Utama Perum Otorita Jatiluhur mengomentari kondisi waktu itu. Karena itu dalam perkembangan selanjutnya, dirasakan perlu untuk perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air di Wilayah Sungai Citarum (WSC) berada dalam "satu tangan" atau satu badan yang disertai tugas dan kewajiban memenuhi kedua kepentingan tersebut secara terencana dan seimbang.

"Dengan dibentuknya Perum Otorita Jatiluhur (POJ), maka badan-badan dan proyek-proyek yang berada di wilayah pengembangan Jatiluhur dibubarkan," kata Ir. Tukul Santoso, Direktur Pengelolaan POJ. Badan dan proyek yang dimaksudkan Tukul ialah Proyek Irigasi Jatiluhur, Proyek Tertier Jatiluhur, PN. Jatiluhur, serta Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Pengairan Purwakarta.

### Perubahan demi Perubahan

Menyimak sejarahnya yang panjang, sudah barang tentu POJ sarat dengan pengalaman. Dengan selesainya Proyek Nasional Serbaguna Jatiluhur, yang meliputi pembangunan waduk, bendungan utama, pembangkit listrik tenaga air, sarana pengairan dan irigasi, berbagai manfaat telah dapat dirasakan oleh masyarakat.

POJ yang dibentuk dengan PP No. 26 Tahun 70 dan diubah dengan PP No. 35 Tahun 1980 merupakan BUMN yang oleh pemerintah telah ditunjuk sebagai pengelola air dan sumber-sumber air serta prasarana pengairan yang berada di

*Ir. H. Mubamad Ulama :*

## Merancang Program Pengembangan

*Pengembangan sumberdaya air di wilayah sungai Citarum dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek melaksanakan rehabilitasi prasarana yang telah ada untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air; jangka menengah membangun prasarana penyaluran untuk mengoptimasikan pemanfaatan air yang telah dapat dikendalikan namun belum seluruhnya dapat dimanfaatkan; jangka panjangnya membangun bendungan dan waduk untuk menampung sebanyak-banyaknya sisa air yang belum dikendalikan. Direktur Utama Perum Otorita Jatiluhur, Ir. H. Mubamad Ulama, dengan cermat dan santun menguraikan visinya. Berikut cuplikan wawancaranya:*

*Tanya (T): Kenapa POJ di-namakan "otorita", apa tidak menimbulkan kendala?*

**Jawab (J):** Nama "otorita" betul-betul hanya sebuah nama. Berbeda dengan Otorita Asahan dan Otorita Batam. Jadi nama otorita tidak menimbulkan kendala apa-apa. Nama otorita di perusahaan POJ itu sendiri ceritanya panjang. Itu semua warisan sejarah. Tapi, yang penting dicatat, POJ itu Perusahaan Umum atau Perum.

*Tanya: Apa prioritas Bapak dalam mengelola POJ?*

**Jawab:** Di POJ, kami merancang pengembangan secara bersama-sama. Prinsipnya kerja sama. Sesuai dengan urutan prioritas yang tercantum dalam peraturan perundangan yang ada, yaitu memanfaatkan air baku untuk kebutuhan air minum, pembersihan kota demi kesehatan lingkungan, pertanian, perikanan, perkebunan, industri serta pembangkit tenaga listrik.

Pertumbuhan kota Jakarta yang diikuti perkembangan pemukiman di pinggiran kota dan kota satelit di sekitarnya, mengarah kepada pertumbuhan *megapolitan city* yang membutuhkan keandalan sumber air baku untuk kebutuhan air minum dan kesehatan lingkungan.



Ir. H. Mubamad Ulama

*Tanya: Kualitas air waduk Juanda itu sendiri bagaimana?*

**Jawab:** Dari hasil pemantauan tim POJ, sepanjang tahun cukup baik. Yang kita pikirkan adalah prasarana penyalurannya dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti pengaruh pencemaran, baik dari limbah industri maupun limbah domestik. Lalu zona-zona yang memerlukan air, perlu dipikirkan sistem penyaluran dan distribusinya. Selain itu, dan ini yang agak sulit, membangun instalasi penjernihan di Jakarta dan sekitarnya.

*Tanya: Menyongsong tahun 2020, apa kira-kira persiapan POJ?*

**Jawab:** Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi strategis di Pantai Utara Jawa Barat akan terus meningkat, terutama industri yang diikuti pemukiman. Ini perlu pemikiran secara dini dalam penyediaan kebutuhan airnya. Selain itu, penelitian pengembangan sumber air di belahan timur wilayah sungai Citarum telah dilaksanakan, dan hasilnya memungkinkan dibangun waduk di sungai Cihérang dan Cipunegara.

Yang juga penting adalah pengembangan sektor pariwisata. Daerah di sektor POJ memiliki banyak obyek wisata yang potensial. ■



wilayahnya. Untuk melaksanakan PP No. 6 Tahun 1981, pemerintah memandang perlu menetapkan POJ sebagai Perusahaan yang menarik dan menerima iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan. "Maka pada tanggal 3 April 1981 telah ditetapkan Keppres RI No. 7 Tahun 1981 tentang Penetapan POJ sebagai perusahaan yang dapat menarik dan menerima iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan," ungkap Muhamad Ulama.

Perubahan demi perubahan terus berlangsung di tubuh POJ menyangkut PP. Demikian pula ketika PP No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembiayaan dan Pengawasan Perjan, Perum, dan Persero diubah dengan PP No. 28 Tahun 1983, maka pengaturan POJ perlu disesuaikan. Menurut Ulama, untuk mengatur kembali POJ, pada tanggal 23 Agustus 1990 telah ditetapkan PP No. 42 Tahun 1990. "Sifat usaha POJ adalah pelayanan bagi kemanfaatan umum yang sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan," tambahnya.

### Mengoptimalkan Potensi

Di bidang pelayanan umum, POJ sudah terdidik dan ditempa pengalaman yang cukup panjang. Sebab selama ini sektor semacam itulah yang digelutinya. Sebagai pengelola sumberdaya air di wilayah sungai Citarum, dalam pelaksanaannya POJ senantiasa berpijak pada 3 aspek, yaitu: melestarikan, mengembangkan dan menggunakan air untuk kepentingan sosial maupun usaha ekonomi.

Jumlah aliran air di wilayah sungai Citarum setiap tahunnya rata-rata 12,90 milyar m<sup>3</sup>. Dengan dibangunnya prasarana pengairan yang telah ada, jumlah aliran yang dapat dikendalikan sebesar 7,60 milyar m<sup>3</sup>. Menurut Muhamad Ulama, sumberdaya air sungai Citarum yang telah dimanfaatkan sampai saat ini kurang lebih 6,00 milyar m<sup>3</sup>, di antaranya untuk pertanian 5,5 milyar m<sup>3</sup>, air minum dan perkotaan 400 juta m<sup>3</sup>, industri 100 juta m<sup>3</sup>.

"Kini saatnya kami 'menjual' seluruh potensi yang kami miliki, dan difokuskan pada pengembangan sektor wisata," tutur, Direktur Teknik Sri Hernowo. Dengan alasan itu pula POJ kini tengah mengajak investor swasta untuk digandengnya.

Danau buatan dengan luas permukaan 83 km<sup>2</sup>, panorama alam yang indah, keanekaragaman bentuk

dan fungsi bangunan waduk, pompa hidraulis karya Prof. Ir. Sedyatmo di Curug, berikut fasilitas penginapan, lapangan golf, tenis, aneka perkebunan tanaman hortikultura, serta budidaya agro wisata lainnya, kesemua itu jelas merupakan "harta karun" milik POJ.

Tak hanya itu. Di lereng bukit dengan pelukan hutan hijau yang cantik jelita, yang jika mata memandang ke bawah tampak cawan raksasa yang memantulkan kemilau matahari, terdapat lahan rekreasi yang menantang, seperti olah raga mendaki bukit, motor cross, terjun payung, serta gantole.

Pihak POJ kini sedang mempersiapkan kiat dan tatalaksananya. Orang-orang yang ingin lepas dari kejenuhan dan rutinitas sehari-hari, mereka yang senang berolah raga, yang mempunyai hoby fotografi, serta kelompok masyarakat yang gemar pada bidang teknik keairan, termasuk di dalamnya wisata ilmiah, adalah kelompok sasaran yang akan dijaring oleh program wisata POJ. "Dalam pantauan kami, remaja, pelajar dan mahasiswa, adalah segmen pasar terbesar, sekitar 60 persen," ujar Tukul Santoso.

Data yang ada menunjukkan kenaikan jumlah wisatawan yang datang ke Jatiluhur kurang menggembirakan. Tahun 1992 tercatat 113.525 orang, baik wisatawan asing maupun domestik. Tahun berikutnya, 1993, hanya 113.760 orang. Untuk itulah POJ terus berbenah diri dan merancang kiat sukses dengan mengacu pada *Multi Concept Resort*, di mana bangunan resort terus dipercantik dan satu sama lain saling menunjang dan melengkapi.

"Bahkan POJ akan menyediakan kompleks *executive suites* yang jauh dari aktivitas dan kesibukan, bagi mereka yang membutuhkan *privacy* dan ketenangan," tambah Sri Hernowo. Konsep yang dikembangkan di sektor ini telah dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kawasan Pariwisata Jatiluhur (RIPPKPJ). Menurut Sri Hernowo, sejak 1989 POJ telah menjalin kerjasama dengan pihak *Pacific Consultant International* (PCI) Jepang, untuk melakukan serangkaian penelitian dan perencanaan bagi pengembangan kawasan wisata Jatiluhur.

Menurut Muhamad Ulama, pengembangan kawasan Jatiluhur ini diusahakan tetap terkendali dan tanpa merusak lingkungan. "Prinsip kelestarian sumberdaya air, baik secara kuantitas maupun kualitas, tidak bisa dilanggar," tegasnya. ■

# Perum Jasa Tirta: Mengantisipasi Tahun 2020



PJT: Untuk bajat hidup orang banyak

**D**istribusi air ibarat peredaran darah dalam nadi. Kalau tersumbat di satu tempat, secara otomatis berakibat buruk di tempat lain. Perumpamaan itulah yang diungkapkan oleh Ir. A. Rusfandi Usman, M. Eng., Direktur Pengelolaan Perum Jasa Tirta (selanjutnya PJT) yang berlokasi di Malang. Dengan filosofi itu pula PJT berketetapan niat untuk memberikan pelayanan terbaik dalam upaya melindungi, melestarikan dan mendayagunakan sumber-sumber air bagi masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Timur.

Sebagai perusahaan yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah, yaitu PP No. 5 tahun 1990, PJT mempunyai tujuan yang bersifat pelayanan umum berupa pemanfaatan potensi air di daerah pengaliran Sungai Brantas, serta sumber-sumber air di sekitar kawasan tersebut guna memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. "Namun demikian, sebagai BUMN yang berstatus Perum, PJT juga berorientasi pada prinsip pengelolaan yang

bersifat *business oriented* sehingga mampu menghasilkan keuntungan, yang pada akhirnya keuntungan tersebut digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat," tutur Ir. Roedjito DM, Dipl. HE., Direktur Utama Perum Jasa Tirta.

Karena itu, PJT tidak cuma berpangku tangan dalam memelihara dan mengembangkan prasarana dan sarana pengairan. Dengan modal *team work* yang baik, segenap jajaran sumber daya manusia yang ada di PJT terus berusaha mengantisipasi perkembangan di masa-masa mendatang, baik menyangkut persiapan administratif maupun pilihan teknologinya. Karena itu, kemampuan dan kerja keras karyawan terus dikembangkan hingga mencapai kapasitas maksimal.

Untuk mencapai keinginan itu, PJT mengerahkan *man power* terbaiknya yang berjumlah 425 orang, sebagian besar *ekspert* di bidang Eksploitasi dan Pemeliharaan atau yang lazim disebut E&P. Tugas utama Eksploitasi itu sendiri, oleh PJT

dibagi dalam dua sasaran, yaitu: *Pertama*, menjalankan manajemen kuantitas air yang berupa penanggulangan banjir dan alokasi sumberdaya air. Usahanya meliputi pengaturan bangunan prasarana pengairan dan pengalokasian air untuk irigasi, PDAM, pembangkit tenaga listrik dan industri.

*Kedua*, menjalankan manajemen kualitas air yang berupa pengendalian polusi air dan pencemaran aneka limbah. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelestarian sumberdaya air dan memfungsikan prasarana pengairan beserta lingkungannya. Dengan menggunakan fasilitas laboratorium kimia yang dimiliki PJT, 50 titik sungai yang tersebar di berbagai wilayah dipantau secara terus menerus dan air yang ada ditempat tersebut diuji kualitasnya. Hasil dari laboratorium itulah yang selanjutnya digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijaksanaan.

Sedangkan untuk pemeliharaan, PJT membagi dua kategori, yaitu pemeliharaan untuk bangunan utama, antara lain seperti bendungan, bendung, dan sungai, serta pemeliharaan untuk bangunan fasilitas seperti gedung, bengkel, serta alat-alat lain. Pemeliharaan ini dilakukan dalam tiga bentuk, yakni pemeliharaan rutin, berkala dan rehabilitasi.

Meski masih muda usia, PJT mempunyai mata rantai yang begitu panjang. Bermula dari pelaksanaan pengembangan wilayah sungai Kali Brantas pada tahun 1961, melalui tiga tahap program rencana induknya, yaitu Rencana Induk I tahun 1961, Rencana Induk II tahun 1973, dan Rencana Induk III tahun 1985, dengan total investasi hingga tahun 1993 sebesar Rp 1,7 triliun.

Rencana Induk I dititikberatkan pada pengendalian banjir dengan membuat waduk-waduk besar sebagai penampung hujan di daerah hulu dan memperbaiki kapasitas pengaliran sungai di hilir. Rencana Induk II dimaksudkan agar waduk-waduk tersebut dapat dimanfaatkan untuk suplai air irigasi dan pembangkit tenaga listrik. Dengan suplai air yang baik di areal persawahan, diharapkan akan terwujud swasembada beras. Selain itu, pemanfaatan potensi air untuk pengembangan tenaga listrik dan pariwisata. Sedangkan Program Induk III, diarahkan pada pemenuhan kebutuhan air baku untuk minum dan industri, terutama untuk kota Surabaya dan sekitarnya sampai tahun 2000.

Hasil pembangunan pada Rencana Induk I

meliputi: Bendungan dan PLTA Sutami, Bendungan dan PLTA Selorejo, Bendungan Lahor, Bendung Lengkon Baru, perbaikan Kali Porong dan rehabilitasi irigasi Delta Brantas. Rencana Induk II menghasilkan pembangunan Bendungan dan PLTA Wlingi, Bendungan Bening, Bendung dan PLTA Lodoyo, Bendung Gunungsari Baru, pengembangan irigasi Lodoyo-Tulungagung, drainase Tulungagung, serta perbaikan sungai Kali Brantas Tengah tahap I. Sedangkan pembangunan pada Rencana Induk III berupa perbaikan sungai Kali Brantas Tengah tahap II, Bendungan dan PLTA Sengguruh, perbaikan Kali Surabaya, rehabilitasi sungai Kali Porong, PLTA Tulungagung Selatan, Bendung Gerak Mrican dan irigasi Waru Turi, Bendung karet Menturus dan Jatimlerek, serta pengendalian banjir Surabaya Barat.

Manfaat nyata yang diperoleh dari semua itu, antara lain mengendalikan banjir 50 tahunan, mengairi sawah seluas 320.000 ha, menghasilkan energi listrik sekitar 875 juta kWh pertahun, mensuplai air baku untuk industri dan PDAM kurang lebih 250 juta m<sup>3</sup> pertahun.

Asset yang dikelola PJT meliputi bangunan air/bangunan utama seperti waduk dan gedung perkantoran untuk sarana operasi, tanah, jalan, jembatan, gorong-gorong, instalasi dan jaringan listrik. "Seluruhnya mencapai Rp 161 milyar", ujar Direktur Keuangan PJT, H. Amiruddin, SE. Sedangkan pendapatan operasional PJT, baik yang berupa pendapatan iuran jasa air (IJA) yang terdiri dari IJA untuk PLTA, IJA untuk air minum, serta IJA untuk industri dari tahun ke tahun terus meningkat. "Hingga tahun 1994 lalu, pendapatan operasional PJT mencapai Rp 28 juta", tambah Amiruddin. Sebuah kenaikan yang tajam jika dibandingkan tahun 1993 baru mencapai Rp 15 juta. "Setelah diaudit BPK, perusahaan ini mendapat predikat sehat sekali atau Wajar Tanpa Pengecualian," ungkapny.

Menurut Direktur Utama PDAM Jatim yang beroperasi di Surabaya, Ir. Husodo, kerja sama antara instansi yang ia pimpin dengan PJT bersifat saling membangun. Tak jauh berbeda dengan Husodo, pihak *user* dari kalangan industri, PT Miwon, yang diwakili oleh Kusno dan Erwin dari Bagian *Research and Development* secara pasti mengatakan tidak ada masalah. "Suplai air PJT untuk PLN tak pernah kurang," ujar Ir. Nani yang mewakili pihak PLN Cabang Surabaya. ■

**Ir. Roedjito DM, Dipl. HE.**

## Waduk itu Ibarat Lumbung

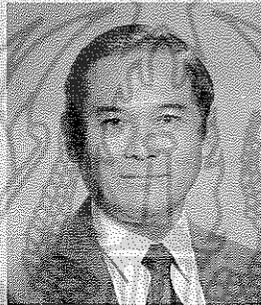
*Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air yang berupa perlindungan, pengembangan, maupun pemanfaatan secara baik dan inovatif pada daerah aliran sungai jelas memerlukan kepiawaian. Di bidang manajemen misalnya, harus ada visi dan kiat tersendiri untuk mengantisipasi perkembangan ke masa depan. Dalam menyongsong abad ke-21, Perum Jasa Tirta sebagai pengelola sumberdaya air di kawasan Jawa Timur sudah mulai mempersiapkan langkah-langkah strategisnya. "Meskipun statusnya Perum, kami harus tampil profesional," ungkap Ir. Roedjito DM, Dipl. HE., Direktur Utama Perum Jasa Tirta. Berikut cuplikan wawancara dengan pemegang komando PJT yang dikenal gesit dan banyak ide ini.*

**Tanya (T):** Sebagai pemimpin puncak PJT, bagaimana Bapak melihat persoalan sumberdaya air di wilayah Jawa Timur?

**Jawab (J):** Sebagai hajat hidup orang banyak, Undang-undang Dasar kita secara tegas sudah mengatakan bahwa sumberdaya air harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum. Ini yang seringkali kita sebut fungsi sosial. Karena itu, air yang ada ini harus kita manfaatkan secara optimal untuk kemakmuran bangsa.

PJT sebagai BUMN yang berbentuk Perum dan ditugasi untuk mengelola sumberdaya air akan terus berusaha memegang amanat tersebut. Melalui sumber daya manusia yang ada, kami terus berusaha mengembangkan bentuk-bentuk pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sebagai Perum, kami senantiasa berpijak pada asas keseimbangan, yaitu 80 persen berupa pelayanan sosial dan 20 persen bersifat komersial.

Untuk itulah PJT terus memperbaiki pola manajemennya, dari yang sifatnya amatiran menuju manajemen profesional. Bagi saya, air itu ibarat beras. Kalau musim panen melimpah, tapi jika masa panen yang sudah berakhir akan kekurangan. Maka manusia zaman dahulu



Ir. Roedjito DM, Dipl. HE.

punya ide agar padi hasil panen itu awet, harus disimpan. Namanya simpanan itu lumbung. Nah, masalah air juga sama. Kalau musim hujan, air melimpah, tapi ketika kemarau, kekeringan. Karena itulah waduk tak jauh berbeda dengan lumbung.

**(T):** Manajemen sumberdaya air yang diterapkan PJT?

**(J):** Ada dua sasaran, yaitu soal kuantitas dan kualitas. Soal kuantitas adalah bagaimana mengatur air saat curah hujan dan pada saat musim kemarau. Ini menyangkut soal distribusi air, soal kelestarian air. Dengan prasarana pengairan yang ada, bagaimana kita mengatasi banjir jika musim penghujan dan mensuplai areal persawahan jika musim kemarau. Tugas-tugas seperti inilah yang kami lakukan.

Kedua menyangkut kualitas air. Tentu bukan cuma masalah suplai air dan kelestarian air, tapi bagaimana jika sumber air itu tercemar? Bukankah hal itu merugikan masyarakat banyak? Untuk itulah PJT sangat *concern* dengan Program Prokasih. Bersama-sama dengan Pemda Jatim dan masyarakat, baik dari kalangan wartawan, artis, pegawai, dan masyarakat lainnya, kami terus melakukan kampanye Program Kali Bersih. ■

*M. Nasruddin Anshoriy Ch.*

Pertama, bila berasal dari tanah hutan, pembukaannya bisa jadi menimbulkan kerusakan lingkungan. Kedua, bila lahan berasal dari alih fungsi lahan pertanian, seperti banyak terjadi di Pulau Jawa, petani tergusur ke luar dari pekerjaannya. Di Jawa, akibat alih fungsi dalam jangka waktu 10 tahun terakhir ini, lahan pertanian telah menyempit sekitar 1.000.000 ha dari 5,7 juta ha menjadi 4,7 juta ha. Dengan rata-rata luas lahan per rumahtangga 0,5 ha, berarti sekitar 2.000.000 rumahtangga petani telah tergusur dari tanahnya. Penciutan lahan pertanian akibat beralih fungsi dan menurunnya jumlah petani secara relatif, bagi pengikut teori pembangunan Rostow dinilai sebagai pertanda kemajuan pembangunan suatu bangsa menuju era industrialisasi. Namun untuk tanah yang secara tradisional milik petani, meskipun diganti rugi, melepaskan aset lahan sama halnya dengan mematikan mata pencaharian petani di sektor ini. Mencari lahan pengganti tidaklah mudah. Pekerjaan pertanian adalah pekerjaan yang sulit dicari alternatifnya karena sangat spesifik;<sup>8</sup> ke mana mereka harus pergi untuk mengadu untung guna bertahan hidup? Secara khusus, apa yang terjadi dengan petani perempuan?

#### *Keeratan Hubungan Persetujuan GATT dengan SAPs (Program Penyesuaian Terstruktur)*

Keterlibatan dunia internasional memberi utang pada negara sedang berkembang untuk melangsungkan pembangunannya membentuk kebijaksanaan yang digariskan oleh Bank Dunia dan IMF. Dengan berbagai macam alasan terutama untuk membiayai pembangunan sehubungan dengan kebijaksanaan anggaran belanja berimbang, Indonesia melakukan pinjaman lunak dari negara maju. Pada masa kini, dengan jumlah utang sekitar U\$ 90 milyar, Indonesia merupakan negara pengutang terbesar keempat di dunia. Karena utang harus dibayar pokok dan bunganya melalui perolehan devisa, di banyak negara berkembang timbul krisis. Indonesia termasuk negara yang rajin mencicil pokok hutang dan membayar bunga. Beberapa negara khususnya Amerika Latin telah melakukan moratorium.

Pada saat ini utang negara berkembang bisa mencapai lebih dari 80% GNP totalnya, dan lebih dari tiga kali lipat total pendapatan ekspor tahunan. Di Indonesia angka itu mendekati 70%, sedangkan persentase utang luar negeri terhadap ekspor tahunan mencapai 250%. Dengan surplus tunai perdagangan internasional kurang dari 6% utang luar negeri total, dengan asumsi tak ada lagi pinjaman baru, dibutuhkan waktu sekitar 50 tahun untuk melunasinya.

Agar negara pengutang mampu mencicil, Bank Dunia dan IMF (*International Monetary Fund*) melahirkan program penye-

8. K.O. Campbell, *Agricultural Marketing and Prices* (Melbourne: Chesire Pty Ltd., 1983); H. Hajim, "GATT, Structural Adjustment Programs and Their Effect on Women in India" juga P.N. Sik, "The Reality of Korean Peasant Today," keduanya dalam L.P. Mariano (ed), *Nurture the Seed of Unity, Take Root and Reclaim Our Lives* (1993), atau dalam L.P. Mariano, et al., *Asian Peasant Women Dialogue on the GATT and SAPs* (Quezon City: AMIHAN, 1993).

suai terstruktur (*Structural Adjustment Programmes-SAPs*) untuk menjamin bantuan finansial lebih lanjut. Program Penyesuaian Terstruktur disebutkan sebagai suatu program untuk menempatkan negara pengutang pada pembangunan yang berkelanjutan melalui perbaikan iklim investasi modal asing, penyederhanaan regulasi perdagangan dan investasi, peningkatan devisa melalui promosi ekspor, pengurangan defisit anggaran Pemerintah melalui pengetatan pembelanjaan, pengurangan birokrasi, penghapusan subsidi, devaluasi, dan penghapusan kontrol harga. Sama halnya dengan proses penyusunan *treaty GATT*, perempuan dan perbincangan masalah *gender* absen dalam proses formulasi SAPs, sehingga analisis kepekaan *gender* dan isu perempuan tak termuat di dalamnya.

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang ditujukan pada ekspor dan kebijakan lainnya sejalan dengan *GATT treaty*. Karena itu membicarakan perdagangan internasional tak bisa terlepas dari praktek utang luar negeri. Keputusan yang berkaitan kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan secara tak langsung telah di-transfer pula pada kreditor, seperti:

a. Prioritas pada keuntungan. Orientasi pada maksimisasi keuntungan tidak sejalan dengan orientasi peningkatan kualitas hidup sumberdaya manusia, khususnya wanita. Misalnya kebutuhan kaum wanita dalam rangka peningkatan statusnya agar tak lagi menjadi subordinat pria, agar tidak lagi menjadi warga negara kelas dua, tak termasuk di dalamnya. Mereka juga tidak memperhitungkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat pedesaan wanita.

b. Negara didorong memproduksi tanaman perdagangan untuk keperluan ekspor agar dapat membayar utang luar negeri, dengan konsekuensi sebagian penduduk tidak dapat menghasilkan cukup pangan untuk memenuhi kebutuhannya;

c. Privatisasi, reduksi, penghapusan, maupun pengembangan institusi baru tanpa komitmen pembelanjaan terhadap berbagai jasa seperti perawatan kesehatan, pendidikan dasar, dan program-program kegiatan aksi sosial, dalam rangka penempatan pembayaran utang pada prioritas atas. Berkaitan dengan peran *gender* wanita sebagai pendidik anak, pemeliharaan dan pelayanan di dalam lingkup domestik, kini fungsi dalam unit sosial paling mikro itu diadopsi lebih luas ke lingkup publik, di mana wanita diperankan tanpa bayaran.

d. Meningkatkan pendapatan melalui privatisasi sumber daya nasional dan perusahaan negara yang bernilai tinggi.

e. Negara berkembang yang berutang pada luar negeri secara sadar atau tidak telah menjadi daerah pembuangan sampah, penimbunan buangan industri, limbah beracun dan limbah nuklir negara-negara kaya.

f. Banyak wanita hidup dalam kemiskinan yang teramat sangat, berusaha bertahan hidup dengan kondisi yang sulit ditolerir.

Kebijakan SAPs dan *GATT* adalah serupa, dan saling menunjang. Bila keduanya berjalan seiring, dampak negatif perlu diantisipasi. Taruhlah orientasi ekspor dan zona pemrosesan barang-

Orientasi pada  
maksimisasi  
keuntungan  
tidak sejalan  
dengan orientasi  
peningkatan  
kualitas hidup  
sumberdaya  
manusia,  
khususnya wanita.

barang ekspor dalam rangka menyambut kehadiran MNC dan TNC. Perusahaan manufaktur itu umumnya mempekerjakan bu-ruh wanita yang rentan terhadap eksploitasi dan perlindungan sosial. Dampak program penyesuaian terstruktur pada golongan perempuan belum mendapatkan perhatian. Penelitian dampak devaluasi mata uang rupiah pada perempuan misalnya, tak banyak dijumpai<sup>9</sup>.

Apakah ragam relevansi hubungan Perdagangan Internasional dan perempuan pedesaan?

### Perempuan: Apa yang Terjadi?

Berbicara tentang perdagangan internasional dan utang luar negeri yang mulai mencuat ke permukaan pada awal 1990-an, ternyata persoalan yang sama dialami oleh perempuan pedesaan di banyak negara sedang berkembang. Sebuah deklarasi, yaitu *Antipolo Declaration* telah disetujui pada tahun 1992 dan menganalisa dampak implementasi GATT dan SAPs pada perempuan pedesaan yang dilakukan pada 10 negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia.<sup>10</sup> Terungkap bahwa bila perdagangan bebas dilaksanakan pada komoditi pertanian di mana harga bersaing, pengalaman petani wanita menunjukkan terjadinya penurunan pendapatan riil petani kecil sejalan dengan menurunnya harga akibat melimpahnya produk dari negara lain dengan tujuan serupa. Para petani wanita menyatakan bahwa pendapatan tidak lagi mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Untuk memperbesar pendapatan keluarga, mereka menambah lapangan kerja sehingga pendapatan bersumber ganda. Namun untuk itu mereka harus bekerja lebih keras, dan jam kerja total lebih panjang.

Beberapa pertemuan lain dilaksanakan untuk membicarakan dampak negatif perdagangan bebas dan kebijakan SAPs tersebut, antara lain: Simposium NGO Asia Pasifik untuk Wanita dalam Pembangunan di Manila (1993), pertemuan Asosiasi Petani Wanita Asia, Kongres Interdisiplin Internasional tentang Wanita (*International Interdisciplinary Congress on Women-IICW*, 1993) di Costa Rica, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Vienna (1993), dan pertemuan yang diselenggarakan oleh PAN di Penang (1994) di

*Terungkap bahwa bila perdagangan bebas dilaksanakan pada komoditi pertanian di mana harga bersaing, pengalaman petani wanita menunjukkan terjadinya penurunan pendapatan riil petani kecil sejalan dengan menurunnya harga akibat melimpahnya produk dari negara lain dengan tujuan serupa.*

9. Hesti R. Wijaya, Sun Umi Lestari dan Keppi Sukesi, *Impact of Devaluation Policies on the Poor in the Rural Areas with Special Attention to Women: Indonesian Country Report* (Malang: Yayasan Pengembangan Pedesaan, 1989); H.R. Wijaya, "Impact of Devaluation Policies on Poor Women Farmers: Study on the Structural Adjustment Programmes in Indonesia at the Micro Level," dalam L.P. Mariano, *loc.cit.*

10. Deklarasi ini menyatakan usaha dan keputusan petani wanita untuk menghadapi ketidakadilan. Pada tingkat regional *Asian Peasant Women Network* telah didirikan untuk memberdayakan mereka mengatasi dampak beserta inti permasalahannya. Aktifitas organisasi ini meliputi: pertukaran informasi mengenai perkembangan GATT dan SAPs; melobi pada tingkat nasional dan internasional; mengadakan kegiatan menyebarkan akibat negatif GATT dan SAPs pada wanita tani ke berbagai pihak; mengadakan program pertukaran kunjungan antar wanita tani negara berkembang dan negara maju untuk saling bertukar informasi dan mempelajari dampak GATT dan SAPs pada wanita; menyebarkan masalah dampak pada forum dan lembaga tingkat internasional, nasional dan lokal; Kajian ilmiah lebih lanjut mengenai dampak dan isu-isu lain yang berkembang.

*Karena kapasitas keterbatasan sektor formal untuk menyerap tenaga kerja, sektor informal umumnya menjadi peluang terbesar. Di dalam negeri, sebagian kecil dari mereka yang terserap dalam sektor formal bekerja sebagai buruh industri manufaktur. Sebagian besar masuk ke dalam sektor informal.*

mana 17 negara Asia-Pasifik hadir. Terakhir, sebanyak 21 negara Asia-Pasific di awal tahun 1995 dalam Konferensi Asia-Pasific tentang Wanita, Lingkungan dan Pembangunan di Melbourne, Australia mendiskusikan pula hal ini. Tiadanya sensitivitas terhadap masalah hubungan *gender* di kalangan penentu kebijakan perdagangan internasional menyebabkan di satu pihak perempuan belum diperhitungkan, dan di pihak lain perempuan dimanfaatkan. Kesemuanya dirasakan sebagai beban dan ketidakadilan.

Di Indonesia, kasus pembangunan pertanian yang menggesur perempuan keluar dari sektor pertanian sebenarnya telah diidentifikasi lebih dari 20 tahun lalu di awal tahun 1970-an ketika program intensifikasi pertanian melalui BIMAS padi di introduksi dalam rangka swasembada beras.<sup>11</sup> Perempuan tani di pedesaan yang tergesur teknologi terpaksa bekerja dalam kegiatan ekonomi di luar sektornya. Sekarang, pola yang sama terjadi dengan dampak lebih intens. Ketika kegiatan usahatani tak bisa dipertahankan lagi kesinambungannya karena lahan pertanian harus dilepas bagi keperluan industri, kegiatan usaha tani baik komoditi ekspor maupun komoditi pangan oleh kebijaksanaan SAPs tak lagi mampu menunjang ekonomi rumah tangga, terpaksa petani keluar dari sektornya.

Karena kapasitas keterbatasan sektor formal untuk menyerap tenaga kerja, sektor informal umumnya menjadi peluang terbesar. Di dalam negeri, sebagian kecil dari mereka yang terserap dalam sektor formal bekerja sebagai buruh industri manufaktur. Sebagian besar masuk ke dalam sektor informal. Tak banyak yang menjadi pengusaha kecil mandiri. Umumnya mereka menjadi buruh kerja produktif di rumah sendiri, buruh bangunan, pedagang, pengusaha kecil, pembantu rumah tangga, bahkan pelacur. Kesemuanya berciri sama, yaitu diupah rendah, tidak atau kurang mendapatkan perlindungan sosial, baik di sektor formal maupun di sektor informal.<sup>12</sup>

Kasus yang paling menyedihkan dialami Korea Selatan di mana tanah-tanah pertanian telah ditinggalkan. Dalam banyak kasus, para petani menyatakan bahwa mereka menghasilkan produk yang tidak mereka inginkan dan makan makanan yang tidak mereka hasilkan. Sama halnya, bila kebijaksanaan GATT diimplementasikan maka kehidupan para petani di negara-negara Asia dan Pasifik akan terpengaruh akibat: harga input pertanian meningkat; harga hasil pertanian jatuh; pekerjaan dan kegiatan wanita menjadi lebih banyak; wanita harus menghadapi industrialisasi.

Analisa lebih jauh menunjukkan bahwa para petani menderita dampak yang tak menguntungkan. Dalam kasus-kasus eks-

11. W.L. Collier, *et al.*, "Recent Changes in Rice Harvesting Methods," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol.IX, No.2, Juli 1973; Pudjiwati Sajogyo, "The Impact of New Technology on Women's Employment," dalam *Women in Rice Farming*, IIRI, (Aldershot: Gower Publishing Company Ltd., 1986) Hesti R. Wijaya, "Women's Access to Land Resources: Some Observations from East Javanese Agriculture," *Women in Rice Farming*, IIRI, (Aldershot: Gower Publishing Company Ltd, 1986).

12. Untuk sektor formal, lihat H.R. Wijaya dan Retty Ratnawati, *Working Conditions and Welfare of Women Workers in Several Enterprises* (Malang: Yayasan Pengembangan Pedesaan, 1992).

trem mereka bangkrut, kehabisan modal untuk melanjutkan usahanya. Sebagian menyatakan petani hidup terlilit utang baik untuk konsumsi sehari-hari maupun untuk biaya usaha tani dari toko-toko, lembaga simpan-pinjam, teman, keluarga dan tetangga. Bahkan sekarang pun ketika perdagangan bebas dan kebijakan transparan seperti tuntutan komitmen GATT belum sepenuhnya berjalan, banyak petani telah menjadi pengangguran dan tidak mempunyai tanah garapan. Mereka harus mencari sumber mata-pencaharian lain.

Akibat paling buruk yang terjadi di pedesaan Korea membandingkan negara lain. Komunitas pedesaan menipis. Setiap tahun sekitar satu setengah juta penduduk desa/mantan petani pergi mencari pekerjaan di daerah urban, meninggalkan desa-desa tanpa generasi muda. Hal ini dimulai oleh apa yang disebut restrukturisasi ekonomi dari pertanian ke industri. Pada saat ini investasi dan industri asing menjamur. Bagi para petani tingginya pajak dan meningkatnya harga sarana produksi pertanian bersamaan dengan rendahnya harga jual produk menyebabkan usaha pertanian sulit dipertahankan. Setiap petani yang terlilit utang, meskipun bekerja keras, tetap saja mereka tidak dapat melunaskannya akibat marjin yang tipis. Produk mereka harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah, karena produk tersebut dihasilkan oleh agroindustri besar yang mempunyai fasilitas mesin.

Termasuk hal yang menyedihkan adalah masalah benih yang menjerumuskan pada menurunnya keragaman hayati asli. Jenis tanaman asli yang semula dihasilkan sendiri oleh petani mengalami kepunahan, digantikan oleh benih-benih impor yang dikatakan unggul. Kini petani harus membeli benih, yang dipromosi sebagai benih unggul baru hasil rekayasa biologis sedemikian rupa sehingga tak bisa dikembangkan sendiri oleh petani. Kenaikan biaya operasional oleh penghapusan subsidi minyak menyebabkan meningkatnya biaya transportasi, yang besarnya tak tertutup oleh penjualan produk petani. Dikhawatirkan apa yang terjadi di Korea lambat atau cepat akan meluas ke seluruh negara pengutang, termasuk secara spesifik pada wanita di rumahtangga, di tempat kerja maupun di masyarakat.

#### *Peran Wanita di Rumahtangga*

Peran gender tak menuntut pria bekerja dalam lingkup rumahtangga. Akibatnya perempuan menanggung beban kerja ganda berlebihan karena ketika dalam proses produksi partisipasi mereka masih belum tampak, kurang dihargai atau kurang dipedulikan, kegiatan mereka bertambah tak saja mencari nafkah dari sumber lain, tapi juga pada peran sosial sehubungan implementasi SAPs.

Masalah tindak kekerasan pada wanita di rumahtangga ditemukan meningkat. Sebab wanita dianggap sebagai milik pria, dan distereotipkan lemah. Ketika menderita depresi akibat menurunnya pendapatan riil, suami mudah melampiaskan kekerasan fisik pada isteri. Kehidupan dirasa keras bagi wanita yang meng-

*Peran gender tak menuntut pria bekerja dalam lingkup rumahtangga. Akibatnya perempuan menanggung beban kerja ganda berlebihan karena ketika dalam proses produksi partisipasi mereka masih belum tampak, kurang dihargai atau kurang dipedulikan, kegiatan mereka bertambah tak saja mencari nafkah dari sumber lain, tapi juga pada peran sosial*

*Internalisasi gender secara logis lebih memprioritaskan anak lelaki untuk memperoleh pendidikan karena mereka akan menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah, sementara anak perempuan yang berperan gender di rumah dianggap tak memerlukan sekolah tinggi.*

hadapi beban kemiskinan karena krisis utang, tidak adanya pendapatan cukup, kurang pangan, kurang modal dan masih harus menerima kekerasan fisik dari suami sendiri.

Urbanisasi dalam fasilitas yang terbatas membuat hidup menjadi sulit bagi mantan perempuan pedesaan yang tergesur dari sektor pertanian, terutama yang berkaitan dengan peran *gender*-nya. Kebutuhan mereka untuk menjalankan peran *gender* kurang terpedulikan. Misalnya kebutuhan air bersih. Wanita menghadapi kesulitan memperoleh air bersih yang makin lama makin tidak mencukupi.

Masalah kekurangan gizi yang lebih lanjut diikuti dengan problem kesehatan sekunder merupakan beban bagi perempuan. Sama halnya adalah ketidakmampuan berperan sebagai ibu sepenuhnya bagi si anak. Anak dipersepsi tidak beruntung karena mereka ditinggal bekerja, tanpa peran substitusi ibu yang profesional. Anak terpaksa berhenti memperoleh pendidikan formal pada usia sekolah, di mana anak perempuan lebih cenderung dikorbankan. Internalisasi *gender* secara logis lebih memprioritaskan anak lelaki untuk memperoleh pendidikan karena mereka akan menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah, sementara anak perempuan yang berperan *gender* di rumah dianggap tak memerlukan sekolah tinggi.

#### *Peran Produktif*

##### *a. Sebagai Petani*

Dalam diskusi mendalam, pandangan logis petani perempuan terhadap kebijaksanaan produksi sebagai komitmen GATT tentang penanaman produk ekspor di satu pihak dan impor pangan di pihak lain adalah bila mereka dapat menghasilkan sendiri, tidak membeli dari negara lain.

Sama halnya dengan kebijakan penghapusan subsidi. Kebijakan intensifikasi berhasil mengubah petani dalam proses produksi dengan menggunakan sarana produksi secara intensif. Sarana produksi kimiawi itu tak bisa mereka produksikan sendiri dan harus dibeli. Kalau kemudian pemerintah memotong subsidi sarana produksi ketika mereka masih belum berkemampuan, yang dilakukan adalah mengurangi kuantum penggunaan dengan konsekuensi penurunan produksi.

Meskipun di tingkat makro devaluasi berhasil menyelamatkan ekonomi negara, tetapi perempuan pada umumnya, mengalami penurunan kesejahteraan. Rumahtangga di pedesaan yang miskin menjadi semakin miskin, dengan beban hidup yang lebih berat bagi perempuan. Transfer kemiskinan antargenerasi juga terjadi. Diskusi di kalangan wanita tani mengkonfirmasi hal ini. Manfaat devaluasi nyaris menetes pada mereka.

Pada tahun 1994, pertemuan Asia dan Pasifik mengenai *Women in Agriculture* (Wanita dalam Pertanian) yang dihadiri peserta dari 17 negara tiba pada kesimpulan yang memprihatinkan akibat berkembangnya agribisnis untuk ekspor. Tumbuhnya agribisnis menggantikan pertanian tradisional dengan "*cash crop*" meluas di kawasan pasifik. Petani tergesur oleh alih fungsi lahan

pertanian menjadi perusahaan perkebunan untuk ekspor. Petani tak lagi memproduksi tanaman pangan. Pengangguran meningkat ketika industri dan jasa tak mampu menyerap mereka. Kekhawatiran tak berkelanjutannya usaha pertanian rakyat telah menjadi kenyataan.

Aksi dan strategi bagi petani perempuan selayaknya terwakili dalam arena politik perdagangan internasional, proses formulasi kebijakan lembaga multilateral, maupun di kalangan pembuat kebijakan tingkat nasional. Bila pembuat kebijakan hanya terdiri dari mereka yang masih buta atau miopia terhadap isu-isu wanita, ketimpangan akan selalu terjadi. Kebijakan pembangunan alternatif dalam paradigma peduli wanita perlu dilahirkan.

#### b. Buruh Formal Industri Manufaktur

Bagi perempuan yang kemudian bekerja di sektor formal sebagai buruh industri manufaktur, jam kerjanya panjang, baik karena alasan untuk mempertinggi pendapatan akibat rendahnya upah, atau pemaksaan lembur dari pihak pengusaha. Buruh kekurangan waktu istirahat dan tidak sempat menikmati waktu senggang. Kondisi di tempat kerja seringkali tak menunjang keselamatan dan kesehatan kerja, seperti bising, berdebu, polusi logam berat, makanan kurang bergisi, kurangnya waktu istirahat, ditambah dengan kurangnya jaminan sosial.<sup>13</sup> Buruh perempuan semacam ini merupakan tulang punggung ekonomi rumahtangga di desanya. Dalam kecekakan upah, mereka mendukung kehidupan keluarga yang ditinggalkan.

Perempuan pedesaan mengetengahkan praktek tidak adil ketika menanggapi zona perdagangan bebas. Zona ini untuk mengembangkan industri manufaktur dan sejenisnya menyerap sejumlah besar tenaga wanita pedesaan. Paradigma konvensional yang berorientasi pada produksi dan efisiensi berusaha keras memaksimalkan keuntungan dipersepsi tak manusiawi bagi buruh perempuan. Tenaga kerja perempuan adalah sasaran yang mudah dieksploitasi sehingga menunjang maksimisasi keuntungan pihak perusahaan. Dalam situasi seperti ini, lembaga tripartit seringkali tak memihak kepentingan buruh, oleh ketiadaan serikat buruh yang mampu membela kepentingan mereka, atau oleh kooptasi serikat buruh dengan pihak pengusaha maupun pemerintah.

#### c. Pekerja Rumahan

Banyak perempuan yang bertahan hidup di pedesaan terjun sebagai pekerja rumahan (*homebased workers*) yang mengambil bahan mentah dari pabrik/pengusaha, menjalankan proses produksi di rumah mereka sendiri (*putting out System*) dan upah dibayar secara borongan atau bijian umumnya rendah.<sup>14</sup> Produk

*Aksi dan strategi bagi petani perempuan selayaknya terwakili dalam arena politik perdagangan internasional, proses formulasi kebijakan lembaga multilateral, maupun di kalangan pembuat kebijakan tingkat nasional.*

13. *Ibid.*

14. Lihat E. Spaan, *Labour Migration from Sri Lanka to the Middle East*, ICA Publication No.83 (Leiden, 1989); Tobing, *et al.*, *Perjalanan Nasib TKI-TKW: Antara Rantai Kemiskinan dan Nasib Perempuan*, laporan penelitian, disunting oleh Y.P. Utomo, (Jakarta: PT Gramedia, 1989); H.R. Wijaya, *International Migration of Indonesian Women to Saudi Arabia* (Malang: Yayasan Pengembangan Pedesaan dan APDC Kuala Lumpur, 1992); Juga H.R. Wijaya, "The Mechanism of International

Kontribusi ekspor tenaga kerja kasar untuk menanggulangi masalah pengangguran di dalam negeri tidak diragukan lagi. Di tingkat makro, sumbangan mereka pada devisa tentu membantu. Sementara itu sumbangan di tingkat mikro baik pada keluarga maupun pada masyarakat jelas bermakna.

mereka memenuhi pasar dalam negeri, dan juga dijual ke pasar internasional. Pekerjaan ini memberi keleluasaan perempuan untuk bekerja mencari nafkah sekaligus melaksanakan peran *gendernya* di rumah. Namun, terlepas dari kontribusinya secara ekonomi di tingkat makro dan mikro, peraturan perundangan belum menjangkau mereka dalam kriteria pekerja. Mereka merupakan golongan pekerja atau buruh yang tak kelihatan (*invisible*), tak masuk dalam angka statistik, tereksplotasi dan belum memperoleh perlindungan sosial.

d. Wanita Pekerja Migran

Dalam era globalisasi, perempuan pedesaan juga pergi menjual tenaga ke luar negeri. Hal ini sejalan dengan SAPs di mana komoditi yang diekspor tak hanya barang. Jasa pun diekspor, termasuk sumberdaya manusia dalam sektor informal atomistik sebagai pembantu rumah tangga. Ketika kerja di lapangan pertanian tak mendukung lagi, atau mereka tergesur keluar, peluang di luar negeri terhadap kebutuhan pembantu rumahtangga dimasuki oleh kaum wanita pedesaan sebagai pembantu rumah tangga, sebagai tenaga kerja migran kontrakan. Perempuan pedesaan yang berasal dari berbagai negara Asia seperti Filipina, Indonesia, Srilanka, India, Bangladesh dan Thailand, negara-negara Pasifik seperti Samoa, Tonga, Fiji; dari Afrika seperti misalnya Maroko, Sudan, Ethiopia maupun kaum Hispanik dari Amerika Latin, mengandalkan keahlian kerjanya selama ini di rana domestik rumahtangga, mereka meninggalkan tanah airnya melakukan pekerjaan tersebut. Kontribusi ekspor tenaga kerja kasar untuk menanggulangi masalah pengangguran di dalam negeri tidak diragukan lagi. Di tingkat makro, sumbangan mereka pada devisa tentu membantu. Sementara itu sumbangan di tingkat mikro baik pada keluarga maupun pada masyarakat jelas bermakna. Namun kaum wanita yang menjadi pembantu rumah tangga itulah yang harus menanggung bebannya, berupa beban finansial, fisik dan psikologis. Di Indonesia, misalnya, ditemukan bahwa dalam keseluruhan proses dari tahap registrasi, pemberangkatan, di tempat kerja, dan ketika pulang kembali ke rumah mereka mengalami berbagai perlakuan perendahan, pelecehan seksual, tindakan kekerasan dan eksploitasi. Berbagai peraturan bagi mereka belum dilaksanakan sepenuhnya, sementara perlindungan sosial belum menjangkau.<sup>15</sup>

Migration of Indonesian Women to Saudi Arabia," Proceedings of Workshop on "Women on the Move" in the Global Conference on Human Rights, Family Violence Prevention Fund, San Francisco, 1993 dan Heyzer *et al.*, *op. cit.*

15. Laporan-laporan dari ILO Regional Office for Asia and Pacific Bangkok mengangkut pekerja rumahan di Asia Tenggara. Untuk Indonesia antara lain dalam Lucita Lazo (ed.), *From the Shadow to the Fore: Practical Actions for the Social Protections of Homeworkers in Indonesia* (1993). Lihat makalah Alex Korns, "Where Are the Homeworkers in the Labour Force Survey? Indonesian Statistics for Manufacturing by Homebased Workers;" H.R. Wijaya dan Heru Santoso, "Village Based Action Research in East Java: Rural Women Homeworkers in the Garment Industry," dalam Lucita Lazo (ed.), *Homeworkers of Southeast Asia: The Struggle for Social Protection in Indonesia*, juga Lucita Lazo, "Homeworkers of Indonesia: A Review of Issues," dan Paulus Wirutomo, "Homeworkers of Indonesia: Who Are They? Where Are They?"

Dengan beraninya mereka bekerja menantang rana yang penuh keasingan baik budaya, bahasa, lingkungan, di samping masalah tersebut diatas, dalam kerja informal soliter sebagai pembantu rumahtangga baik ke Saudi Arabia, Malaysia, Singapura, maupun Hongkong. Hasil penelitian TKW ke Saudi Arabia menunjukkan bahwa mereka tereksplorasi dan mengalami pelecehan sejak pendaftaran, di mana lebih lanjut mereka tidak mendapatkan perlindungan sosial selayaknya di tempat kerja. Cara masuk ke negara lain seperti Malaysia secara ilegal yang ditempuh dengan penuh resiko dilakukan pula oleh wanita. Di samping dalam kerja pembantu rumahtangga, di sektor informal mereka berjualan sebagai pengecer, pedagang kakilima. Adapun di sektor formal, mereka menjadi buruh rendahan di restoran, toko, kantor, buruh bangunan dan perkebunan.

### *Perempuan di Masyarakat*

Peran wanita yang ditetapkan oleh ideologi *gender* bertanggungjawab mengatur rumahtangga, menyiapkan makanan keluarga, diperluas dalam lingkup publik yakni memenuhi peran pelayanan yang tidak mampu ditutup oleh anggaran pemerintah seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Seringkali hal ini dilegitimasi melalui kebijaksanaan peningkatan peranan wanita, dan didukung oleh peran *gender* wanita sebagai pekerja sosial di lingkup publik yang tak perlu dibayar.

Pengurangan anggaran pemerintah untuk program sosial bisa cukup besar. Di Filipina pemotongan anggaran kesehatan mencapai 40 persen. India juga mengalami hal yang sama. Di Korea, daerah pedesaan mengalami kemunduran karena ditutupnya fasilitas kesehatan. Banyak negara mengadopsi cara-cara tidak konvensional untuk mengatasi anggaran kesehatan yang kecil di satu pihak dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang tinggi di pihak lain. Pekerjaan itu dialihkan ke pundak wanita yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kesehatan masyarakat terutama untuk anak-anak khususnya Balita dan kaum wanita sendiri, seperti halnya Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Sama halnya di negara-negara lain (Filipina, India, Korea) program kesehatan dikembangkan secara ekstensif, secara swadaya dan swadana oleh wanita.

### **Penutup**

Utang luar negeri dengan pembayarannya yang difasilitasi oleh kebijakan SAPs dan persetujuan GATT, khususnya liberalisasi perdagangan ternyata menjadi akar permasalahan yang kurang menguntungkan bagi perempuan. Restrukturisasi perdagangan internasional perlu peka dan responsif terhadap masalah ini. Lebih mengakar lagi, ketidakpekaan barangkali disebabkan karena keilmuan yang dipakai sekarang tak berorientasi pada perempuan, yang seharusnya mempergunakan dasar keilmuan Studi Wanita. Sebagai keilmuan baru yang tidak konvensional, Metodologi Penelitian Studi Perempuan yang langsung menolong

*Banyak negara mengadopsi cara-cara tidak konvensional untuk mengatasi anggaran kesehatan yang kecil di satu pihak dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang tinggi di pihak lain. Pekerjaan itu dialihkan ke pundak wanita yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kesehatan masyarakat terutama untuk anak-anak khususnya Balita dan kaum wanita sendiri.*

Merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan berorientasi pada perempuan berarti perlu memberikan kesempatan pada aparat baik perencana maupun pelaksana untuk belajar menangani kegiatan yang responsif gender.

perempuan secara partisipatori bisa diterapkan.<sup>16</sup>

Pemecahan perlu dilakukan bagi masalah kesejahteraan dan kehidupan wanita pedesaan yang menurun akibat alih fungsi lahan pertanian rakyat menjadi area industri, agribisnis, area olahraga seperti halnya padang golf dan tempat rekreasi yang diperlukan. Bersamaan denganantisipasi kurangnya daya saing dalam arena perdagangan bebas, masalah perempuan pedesaan seperti pengangguran, pekerjaan tidak tetap, kekurangan gizi, kelaparan, jam kerja yang panjang untuk kegiatan produktif di rumah dan di tempat kerja, berbagai beban kerja di masyarakat, dalam situasi kurangnya dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah oleh ketidaktampakan isu perempuan, selayaknya mendapatkan perhatian serius.

Kesempatan perlu disediakan bagi perempuan pedesaan untuk diperhitungkan dan diakui peranannya, serta diberi bantuan, perlindungan, jalan keluar terhadap problema yang dihadapi. Secara partisipatori, perempuan tani selayaknya dimanusiakan. Karena banyak yang belum diketahui tentang apa saja yang sebetulnya mereka lakukan, seharusnya mereka diikutsertakan dalam merancang kegiatannya mencari jalan keluar, berdasarkan potensi dan keterbatasannya, didiskusikan kebutuhannya, dan ditampung berbagai aspirasinya.

Kebutuhan untuk perempuan pun perlu dipahami secara luas, sejak kebutuhan praktis, sejak kebutuhan akan air bersih hingga kebutuhan strategis yang bertujuan mengangkat perempuan pada status sama, hak dan kesempatan sama dengan sebagai sesama manusia dan warga negara dengan kaum lelaki.

Sebagai suatu kegiatan baru di luar rutinitas, merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan berorientasi pada perempuan berarti perlu memberikan kesempatan pada aparat baik perencana maupun pelaksana untuk belajar menangani kegiatan yang responsif gender. Untuk menghindari kehilangan jatidiri dan ketidakpedulian perempuan yang pada akhirnya menyebabkan kehilangan ekonomi (*economic lost*) dan kehilangan sosial (*social lost*), aparat berbagai jenjang dan lembaga multilateral perlu peka gender dan responsif gender dalam aspek perdagangan internasional. Mengasah kepekaan masalah gender perlu mendapat prioritas tertinggi, melalui penyadaran gender termasuk pemimpin, pengambil kebijaksanaan, para perencana, tehnokrat, tenaga ahli dan praktisi agar terlepas dari internalisasi gender, berkemampuan berpikir responsip masalah gender dalam perdagangan internasional di tingkat makro dan alur ke bawah di tingkat ekonomi pedesaan yang berkaitan dengan peran dan status wanita.

16. Lihat berbagai literatur tentang Women's Studies antara lain R.E. Klein, "How to Do What We Want to Do: Thoughts about Feminist Methodology," Maria Mies, "Towards a Methodology for Feminist Research," T.E. Jayaratne, "The Value of Quantitative Methodology for Feminist Research," dalam G. Bowles dan R.D. Klein, *Theories of Women's Studies* (New York: Routledge & Kegan Paul Inc., 1983). Dalam bahasa Indonesia baca H.R. Wijaya, "Metodologi Penelitian Studi Perempuan dari Perspektif Feminis," dalam *Warta Studi Perempuan*, Vol.3, No.1, 1992, hal. 25-32.

Kurangnya pengetahuan tentang masalah perempuan serta kurangnya kepekaan *gender* yang menyebabkan kalau pun perempuan masuk dalam perencanaan, seringkali belum didukung implementasi<sup>17</sup> perlu di antisipasi. Untuk itu dampak liberalisasi perdagangan bagi ekonomi pedesaan khususnya yang berkaitan dengan peri kehidupan wanita harus di monitor, dan dikaji secara ilmiah dengan menggunakan metodologi Studi Wanita sebagai bidang ilmu mandiri.

Tentunya adalah pekerjaan yang berat untuk menggugat persetujuan GATT yang dikelola WTO dan SAPs agar mempedulikan perempuan. Keberanian wanita Asia dan Pasifik mengeluarkan pendapat tentang belum adanya keberpihakan pada mereka perlu mendapat perhatian. Dalam era pembangunan, perempuan tak saja menjadi pelaku aktif, namun juga pemeroleh manfaat pembangunan, menerima bagian adil dari kue hasil pembangunan. Pekerjaan ini hanyalah suatu permulaan dalam rangka mewujudkan transformasi struktural yang mencakup:

- a. transformasi struktural dalam hubungan finansial, komersial dan teknologi antara negara yang terlilit utang dan negara pemberi utang yang kaya;
- b. proses politik yang demokratis dengan pendekatan partisipatori yang menjamin suara wanita tentang kebutuhan spesifik dan strategisnya akan didengar.
- c. menempatkan isu *gender* dalam agenda kebijakan nasional dan internasional yang berhubungan dengan GATT dan SAPs.●

17. Lihat S. Jayaweera, "Policies in Women's Development: Directions and Implications," dalam Rita Raj-Hasshim dan N. Heyzer (eds.), *Gender Sensitivity in Development Planning: Implementation and Evaluation* (Kuala Lumpur: Asian and Pacific Development Centre, 1991); C.O.N. Moser, *Gender Planning and Development: Theory, Practice & Training*, (London: Routledge).





dunia usaha  
dunia anda  
dunia kita bersama

warta ekonomi  
memberitakan situasi  
dunia usaha masa kini

*Mitra Usahawan & Profesional*

## **WARTA EKONOMI**

MAJALAH BERITA EKONOMI & BISNIS

Alamat Redaksi & Tata Usaha :

Gedung Warta Jl. Kramat VII/11, Jakarta 10430, Telp. 3101941 (3 saluran), 335599 (3 saluran),

Telex : 61553 WARTA IA, Fax : (021) 332110, P.O. Box 2093